

**PERAN WALHI DALAM MEMBANGUN KESADARAN
EKOLOGIS MASYARAKAT TERHADAP TPA
GAMPONG JAWA KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RAIHAN

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama
NIM. 190305078



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2026 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

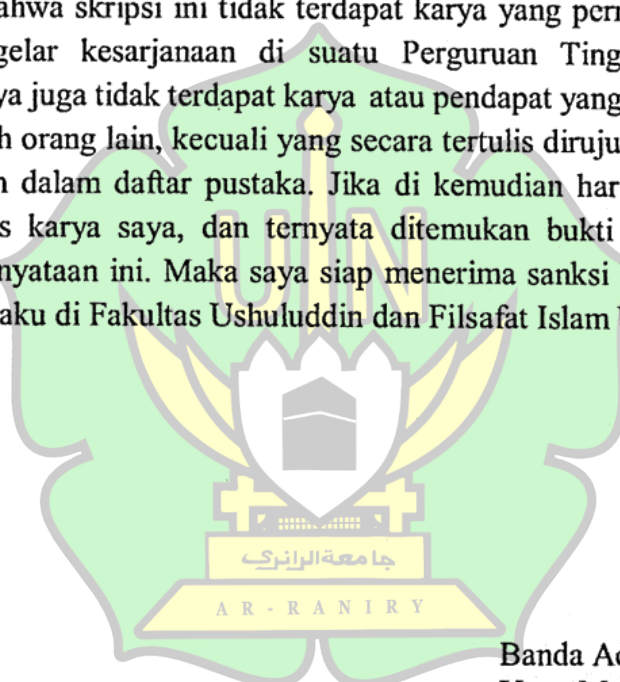
Nama : Muhammad Raihan

Nim :190305078

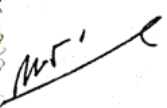
Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Islam UIN Ar-Raniry.



Banda Aceh, April 2026
Yang Menyatakan,



mad Raihan
NIM. 190305078

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Dalam
Ilmu Ushuluddin dan Filsafat,
Jurusan Sosiologi Agama**

Oleh:

Muhammad Raihan

NIM. 190305078

Disetujui Oleh:

AR-RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Fuadi, M.Hum
NIP. 196502041995031002



Nofal Lata, M.Si
NIP. 198410282019031004

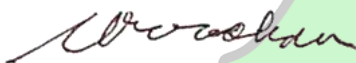
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah
Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata
Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat (Sosiologi Agama)

Pada hari/ Tanggal : Senin/ 06 Juli 2026
21 Muharram 1448 H

Di Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



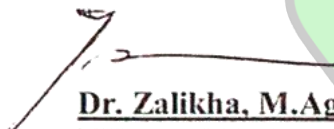
Drs. Fuadi, M.Hum
NIP. 196502041995031002

Sekretaris,



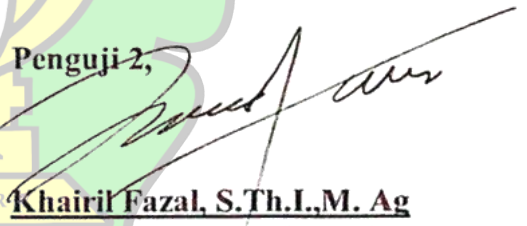
Nofal Liata, M.Si
NIP. 198410282019031004

Penguji 1,



Dr. Zalikha, M.Ag
NIP. 197302202008012012

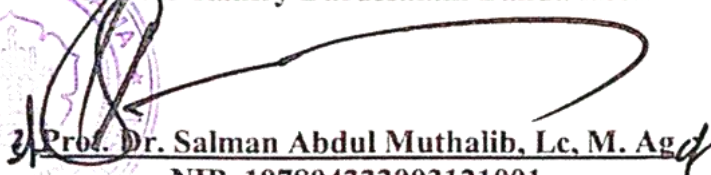
Penguji 2,



Khairil Fazal, S.Th.I., M. Ag
NIP. 199207212025211007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M. Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/ NIM : Muhammad Raihan/ 190305078
Judul : Peran WALHI Dalam Membangun Kesadaran Ekologis Masyarakat Terhadap TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh
Tebal Skripsi : 83 halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Drs. Fuadi, M.Hum
Pembimbing II : Nofal Liata, M.Si

Keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gampong Jawa Kota Banda Aceh yang mengalami peningkatan volume sampah dan melebihi kapasitas telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya membangun kesadaran ekologis masyarakat melalui peran berbagai pihak, salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran WALHI Aceh dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat terhadap TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh serta mengetahui kendala yang dihadapi WALHI dalam pelaksanaan upaya tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif terhadap pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dan Kemudian Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri atas perwakilan WALHI Aceh, aparatur Gampong Jawa, masyarakat sekitar TPA, dan pengelola TPA. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WALHI Aceh berperan dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat melalui program Sekolah Ekologi, sosialisasi dan edukasi lingkungan, pelatihan pengelolaan sampah dan pembuatan kompos, kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, diskusi publik, serta pendampingan advokasi hak-hak lingkungan masyarakat. Pendekatan partisipatif dan persuasif-edukatif yang diterapkan mampu meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, kebiasaan yang sulit diubah, keterbatasan sumber daya organisasi, serta belum optimalnya dukungan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan di sekitar TPA.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa WALHI Aceh telah menjalankan perannya sebagai edukator, fasilitator, advokat, dan pendamping masyarakat dalam membangun kesadaran ekologis di Gampong Jawa. Meskipun demikian, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara WALHI, pemerintah, dan masyarakat agar upaya peningkatan kesadaran ekologis dapat berlangsung secara berkelanjutan dan mampu mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Walhi Dalam Membangun Kesadaran Ekologis Masyarakat Terhadap TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh”. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc. M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Musdawati, M.A, Selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Ar-Raniry.
3. Drs. Fuadi, M.Hum, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya dengan baik.
4. Nofal Liata, M.Si, sebagai pembimbing II yang telah membantu dan

memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Abu Bakar dan Ibunda tercinta Sukarni, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya semua, angkatan 2019, Sahabat dan seluruh angkatan 2019

Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya semua, angkatan 2019 Sosiologi Agama, seluruh anggota UKM PA-LH GAINPALA Ar-Raniry yang telah memberi dukungan, arahan dan nasehat sampai saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki.

Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh,
Juli 2026

Muhammad
Raihan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Kesadaran Kolektif Emile Durkheim	17
C. Definisi Operasional	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Lokasi Penelitian.....	28
B. Jenis Penelitian	28
C. Informan Penelitian	29
D. Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Gampong Jawa	34
1. Kondisi Geografis dan Demografis Gampong Jawa	30
2. Keberadaan dan Sejarah TPA Gampong Jawa	36
3. Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Gampong Jawa..	37
4. Kondisi Ekonomi Masyarakat terkait TPA	38

B. Peran Walhi dalam Membangun Kesadaran Ekologis Masyarakat terhadap TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh	38
1. Latar Belakang Keterlibatan dan Program Kerja WALHI	39
2. Bentuk Edukasi dan Sasaran Program WALHI.....	46
3. Respon Masyarakat terhadap Program WALHI.....	51
C. Hambatan yang dihadapi oleh WALHI dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat di gampong jawa kota banda aceh	60
1. Kendala Internal dan Eksternal WALHI dalam Pelaksanaan Program	61
2. Hambatan Budaya dalam Perubahan Perilaku	67
3. Dukungan Pemerintah Daerah.....	72
4. Pemahaman Masyarakat serta Tokoh Masyarakat atas Kesadaran Ekologis.....	77
D. Analisis Penelitian.....	81
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing Skripsi dari Ketua Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin UIN Ar-raniry
- Lampiran 5 : Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sampah merupakan sebuah permasalahan yang sulit untuk ditangani di Indonesia. Sampah yang setiap hari semakin bertambah tentunya membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan pengelolaan sampah, bertambahnya jumlah sampah tidak terlepas dari jumlah populasi yang semakin meningkat dan jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terbatas.¹

Pada tahun 2024 jumlah timbunan sampah di 328 Kabupaten atau Kota di Indonesia adalah sebanyak 34.797.278,68 ton. Selain itu menurut data BPS, Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah per tahun dan hanya 10-12% sampah yang dapat di daur ulang. Tentunya sampah yang tidak terdaur ulang akan berakhir di TPA sehingga mengakibatkan timbunan sampah di TPA semakin tinggi, yang mana hal ini dapat mencemari lingkungan.²

Salah satu wilayah yang terdapat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau pengelolaan sampah adalah di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. TPA ini merupakan satu-

¹ Nur Hikmah, "Perilaku Hidup Sehat Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gampong Jawa Kota Banda Aceh", dalam *JAROW: Journal of Ar-Raniry on Social Work*, 2(2), (2024), hlm. 91.

² BPS Indonesia, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024*, (Jakarta: BPS RI, 2024), hlm. 34.

satunya tempat memproses sampah di Kota Banda Aceh, tentunya sebagai salah satu kota yang ramai (padat) penduduk, pastinya memproduksi jumlah sampah yang cukup besar, sehingga hal ini membuat lokasi ini cukup dipadati dengan sampah, dan bahkan dapat menyebabkan overload.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pengelollan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Kebersihan Kota (DLHK3) Kota Banda Aceh, TPA Kota Banda Aceh yang berada di Gampong Jawa telah mengalami kelebihan kapasitas (Overload) sejak tahun 2019. Volume sampah terus mengalami peningkatan setiap tahun. Tentunya kenaikan volume sampah ini disebabkan oleh beberapa kegiatan yang dipusatkan di Banda Aceh dan juga terus bertambahnya jumlah penduduk di Banda Aceh. sampah yang paling mendominasi di TPA Gampong Jawa yaitu sampah sisa makanan, yang jumlahnya sebanyak 60 persen.³

Berikut merupakan jumlah produksi sampah TPA Gampong Jawa Banda Aceh pada tahun 2018-2023 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

³ Teuku Muhammad Valdy Arief, Sampah Warga Banda Aceh Meningkat, TPA Gampong Jawa "Overload", diakses dari url <https://regional.kompas.com/read/2024/01/07/135921878/sampah-warga-banda-aceh-meningkat-tpa-gampong-jawa-overload>, (2024)

**Tabel 1.1 Produksi Sampah TPA Gampong Jawa Tahun
2018-2023**

No	Tahun	Jumlah Produksi Sampah (Ton)
1	2018	80.745
2	2019	73.728
3	2020	80.657
4	2021	79.669
5	2022	90.174
6	2023	93.506

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Kebersihan Kota (DLHK3) Kota Banda Aceh (2025)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah produksi sampah paling tinggi adalah pada tahun 2023 yaitu berjumlah sebanyak 93.506 ton, selain itu jumlah produksi sampah cenderung menaik pasca tahun 2019, walaupun sempat turun pada tahun 2021, akan tetapi pada tahun 2022 jumlah produksi sampah kembali mengalami kenaikan yang signifikan. Tentunya data ini menunjukkan fakta bahwa TPA di Gampong Jawa Banda Aceh telah mengalami lonjakan sampah, sehingga pastinya akan memberikan dampak yang buruk bagi warga sekitar yang berada di wilayah itu.

Selain itu, adanya TPA di wilayah Gampong Jawa juga sangat mencemari air dan udara di wilayah tersebut. Sampah yang berada di TPA tentunya mengeluarkan bau yang tidak sedap

sehingga dapat mengganggu masyarakat dalam beraktifitas. Selain itu kondisi ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan, masyarakat rentan terkena penyakit gatal dan diare, sehingga diperlukan kesadaran akan masyarakat bahwa pentingnya dalam menjaga lingkungan agar tetap sehat.

Dalam perspektif Islam, menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap alam karena lingkungan merupakan amanah yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup seluruh makhluk.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya:

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum [30]: 41).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di darat maupun di laut merupakan akibat dari aktivitas manusia. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan

lingkungan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Sejalan dengan hal tersebut, Allah Swt. juga berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf [7]: 56).

Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan perintah agama. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran ekologis masyarakat agar mampu menjaga lingkungan, mengurangi pencemaran, dan berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Maka dari itu, masyarakat di Gampong Jawa diharapkan dapat memiliki kesadaran ekologis, yaitu kesadaran antara mahluk dan lingkungannya dalam satu tempat dan meyakini bahwa terdapat keterkaitan antara manusia dan lingkungan.⁴ Hal ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan hubungan yang dimiliki oleh masyarakat dan lingkungan, sehingga jika masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik akan

⁴ Ita Minarti dkk, "Adaptasi Sosio-Ekologis dan Implementasi Etika Lingkungan di Kelurahan Kahuripan Kota Tasikmalaya", dalam *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(2), (2024), hlm. 104.

lingkungan, masyarakat tentunya akan semakin bertanggungjawab dan dapat menjaga lingkungan menjadi lebih baik.

Namun, berdasarkan observasi awal penulis mendapati bahwa masyarakat Gampong Jawa masih ada yang tidak menjaga lingkungan dengan baik atau dengan kata lain tidak memiliki kesadaran ekologis. Mereka tidak membersihkan lingkungan rumahnya (sampah berserakan, air yang tidak disaring) dan ada juga yang bahkan mengumpulkan sampah di lingkungan rumahnya (pemulung). Tentunya hal ini dapat merugikan bagi dirinya dan juga masyarakat sekitar, karena hal ini akan berdampak buruk bagi mereka, seperti gangguan kesehatan dan juga pencemaran lingkungan.

Kurangnya kesadaran dari masyarakat Gampong Jawa dalam membangun kesadaran ekologis, tentunya perlu diperhatikan secara serius. Selain itu, kurangnya perhatian pemerintah dan juga tidak adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sampah, maka sangat dibutuhkan peran dari pemerhati lingkungan yang dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan memberikan bantuan berupa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk peduli akan lingkungan.

Salah satu LSM yang berfungsi dan berkaitan langsung dengan lingkungan adalah WALHI. WALHI merupakan salah satu LSM yang berfokus pada gerakan lingkungan hidup di Indonesia, dengan peran advokasi, pendampingan, dan edukasi untuk meningkatkan pengawasan masyarakat sipil terhadap kebijakan

dan pembangunan yang berdampak pada lingkungan.⁵ Sebagai salah satu LSM lingkungan yang besar dan sangat berpengaruh, tentunya WALHI dapat memberikan masukan atau berhadapan langsung dengan pemerintah terkait masalah pengelolaan sampah dan harus berperan aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat agar menjadi lebih peduli terhadap lingkungannya.

Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti mendapati bahwa peran yang dilakukan oleh WALHI tidak maksimal karena WALHI tidak memberikan edukasi ataupun sosialisasi secara langsung kepada masyarakat Gampong Jawa akan pentingnya menjaga lingkungan dan meningkatkan kesadaran ekologis. WALHI Aceh hanya memberikan himbauan kepada masyarakat (secara umum) melalui artikel media online, sehingga hal ini tidak akan merubah perilaku masyarakat untuk lebih sadar akan menjaga lingkungan.

Selanjutnya, observasi peneliti juga mendapati bahwa WALHI tidak terlibat langsung ke lapangan (TPA Kota Banda Aceh), hal ini dibuktikan tidak adanya pemberitaan yang memberitakan bahwa WALHI melihat langsung atau melakukan pengecekan, bahkan di website WALHI Aceh yaitu <https://walhiaceh.or.id/> tidak ada yang memberitakan terkait melakukan kegiatan di TPA Kota Banda Aceh.

⁵ Sahvina Tesya Putri dkk, “Advokasi Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) SUMSEL dalam Pencegahan Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir”, dalam *communnity Development Journal*, 5(5), (2024), hlm. 9973.

Obervasi peneliti selanjutnya juga mendapati bahwa kurangnya peran dari WALHI dalam mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memperhatikan masyarakat Gampong Jawa. Sebagai pihak yang menjalin hubungan kritis dan konstruktif dengan pemerintah, seharusnya WALHI dapat memberikan masukan dan mendorong agar Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membuat kebijakan yang dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Maka dari itu, sebagai organisasi pemerhati lingkungan tentunya sangat dibutuhkan peran yang lebih baik dari WALHI dalam memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat Gampong Jawa untuk menjaga lingkungan dengan baik. WALHI harus mampu mengajak masyarakat untuk bekerjasama dan memberikan edukasi (sosialisasi) kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan (kesadaran ekologis), sehingga diharapkan untuk ke depannya dapat meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat Gampong Jawa menjadi lebih baik.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan ini, sehingga judul pada penelitian ini adalah **“Peran WALHI dalam Membangun Kesadaran Ekologis Masyarakat terhadap TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini tentunya memiliki fokus, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Adapun fokus dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian fokus pada peran WALHI dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat di Gampong Jawa Banda Aceh.
2. Penelitian fokus pada hambatan yang dihadapi WALHI dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana peran WALHI dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat terhadap TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh WALHI dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat di Gampong Jawa Kota Banda Aceh?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berikut merupakan tujuan dari penulisan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan WALHI dalam membangun kesadaran ekologis di TPA Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh WALHI dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat terhadap TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

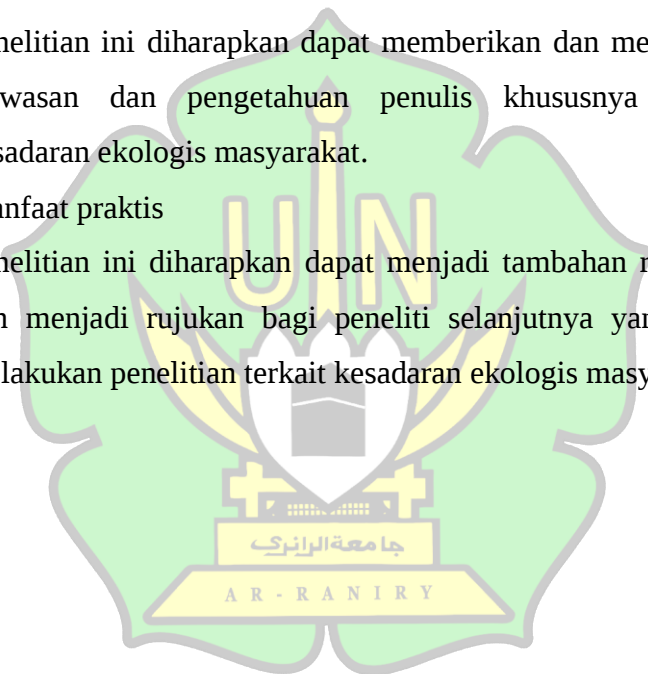
Berikutnya, penulisan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya terkait kesadaran ekologis masyarakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait kesadaran ekologis masyarakat.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan ide pokok dari kajian atau peneliti terdahulu yang bertujuan sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini, penelitian terdahulu berasal dari jurnal ilmiah dan juga dari Skripsi pada peneliti sebelumnya, penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi dan pembanding bagi penulis berjumlah sebanyak lima, berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Asraf Rahmatul Hadi dengan judul “Keterlibatan LSM WALHI dalam Advokasi Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Penanganan Sampah di TPA Gampong Jawa)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya keterlibatan LSM WALHI Aceh dalam mengadvokasikan permasalahan penanganan persampahan di Kota Banda Aceh khususnya di TPA gampong Jawa dengan melakukan advokasi secara langsung ke pemerintah yaitu turun lapangan dengan aksi-aksinya, melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik agar mengurangi sampah plastik dan advokasi melalui tulisan-tulisan ataupun artikel yang berkenaan dengan permasalahan lingkungan terutama yang berkaitan dengan sampah. Hal ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat dan

menyampaikan ke pemerintah isu-isu penanganan sampah di Banda Aceh. Kemudian dampak yang timbul dari advokasi tersebut dapat dilihat sudah adanya qanun terkait penanganan sampah, pengoptimalan pelaksanaan qanun, adanya kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan yaitu persampahan dan adanya program terbaru serta kerja sama pemerintah dengan pihak swasta untuk menangani sampah yang di Banda Aceh.⁶

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Asraf Rahmatul Hadi dengan penulis yaitu pada fokus penelitian. Penulis fokus penelitian pada peran yang dilakukan WALHI dalam meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat, penelitian yang penulis lakukan tidak fokus pada proses politik, terutama advokasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Asraf Rahmatul Hadi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maulidar dan Ambia Nurdia dengan judul “Pengelolaan Sampah Plastik di TPA Kampung Jawa Banda Aceh dan Dampak Sampah Plastik bagi Lingkungan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan plastik disatu sisi telah mendatangkan manfaat yang cukup besar, namun di sisi lain karena sifatnya yang kurang baik terhadap kesehatan dan juga sulit diurai oleh lingkungan maka produk plastik dan sampahnya akan menimbulkan masalah baru. Namun demikian, keberadaannya tidak bisa terlepas dari kehidupan

⁶Asraf Rahmatul Hadi “Keterlibatan LSM WALHI dalam Advokasi Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Penanganan Sampah di TPA Gampong Jawa”, [Skripsi Ilmu Politik, UIN Ar-Raniry, 2023].

manusia sehingga manusia perlu mengantisipasi pemakaian plastik dan pembuangan sampah plastik dengan benar sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Sampah plastik jika dikelola dengan benar yaitu memakai konsep produksi bersih (3R) akan mengurangi limbah dan menciptakan iklim usaha yang menguntungkan serta dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar.⁷

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Maulidar dan Ambia Nurdia dengan penulis yaitu pada fokus penelitian. Penulis fokus pada peran dan hambatan yang dihadapi WALHI dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat. Sedangkan Maulidar dan Ambia Nurdia fokus pada pengelolaan sampah dan dampak sampah plastic bagi lingkungan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurlena Andalia dkk dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat sekitar TPA Banda Aceh melalui Edukasi Pengelolaan Sampah Berbasis *Circular Economy*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di sekitar TPA Banda Aceh berhasil memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. Edukasi berbasis *circular economy* terbukti efektif meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai ekonomis sampah, dari yang

⁷ Maulidar dan Ambia Nurdin, “Pengelolaan Sampah Plastik di TPA Kampung Jawa Banda Aceh dan Dampak Sampah Plastik bagi Lingkungan”, dalam *Public Health Journal*, 2(6), (2023).

semula hanya dianggap sebagai limbah menjadi sumber daya potensial. Namun, keberhasilan ini masih diiringi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sarana produksi daur ulang, fluktuasi motivasi masyarakat, dan pemasaran produk yang masih terbatas. Tantangan tersebut menunjukkan perlunya dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta agar program ini dapat berkembang lebih optimal.⁸

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurlena Andalia dkk dengan penulis yaitu pada fokus penelitian. Penulis fokus pada peran dan hambatan yang dihadapi WALHI dalam membangun kesadaran, sedangkan Nurlena Andalia dkk fokus pada edukasi pengelolaan sampah berbasis *circular economy*. Selanjutnya perbedaan berada pada metode penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif sedangkan Nurlena Andalia dkk menggunakan metode kuantitatif dengan penerapan survei.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Kartiko Utami dengan judul “Analisis Gerakan Politik Hijau WALHI Melalui Media Sosial Instagram dalam Mewujudkan Kesadaran Lingkungan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WALHI memanfaatkan Instagram sebagai sarana untuk merespons momen politik dan krisis ekologi. Fase awal ditandai dengan mencuatnya peluang politik melalui kebijakan yang kontroversial. WALHI kemudian memobilisasi, membingkai, dan menyebarluaskan aksi

⁸ Nurlena Andalia dkk, “Pemberdayaan Masyarakat sekitar TPA Banda Aceh melalui Edukasi Pengelolaan Sampah berbasis Circular Economy”, dalam *Jurnal Ragam Pengabdian*, 2(2), (2025).

melalui penyebaran narasi visual dan kampanye tagar yang memperluas solidaritas. Pada fase akhir, WALHI sebagai organisasi telah mengalami proses transformasi dari gerakan advokasi berbasis lapangan menjadi aktor digital yang profesional, strategis, dan adaptif terhadap teknologi. WALHI melalui @walhi.nasional bersama berbagai pihak seperti relawan, akademisi, komunitas, dan publik berkontribusi dalam mendorong advokasi kelembagaan dan penyusunan ulang wacana kebijakan terkait lingkungan.⁹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Kartiko Utami dan penulis yaitu pada fokus dan lokasi penelitian. Penulis fokus pada peran WALHI dalam meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat, sedangkan Wahyu Kartiko Utami fokus pada pemanfaatan media sosial Instagram dalam mewujudkan kesadaran lingkungan. Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah berada di Kota Banda Aceh, sedangkan Wahyu Kartiko Utami berada di Jakarta.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sheha Adhelia Octavianie dan Laila Kholid Al Firdaus dengan judul “Partisipasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta Dalam Advokasi Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan emisi karbon di Jakarta belum menyentuh akar

⁹ Wahyu Kartiko Utami, “Analisis Gerakan Politik Hijau WALHI melalui Media Sosial Instagram dalam Mewujudkan Kesadaran Lingkungan”, dalam *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 2(1), (2025).

permasalahan yang terjadi. Mulai dari pembatasan kendaraan pribadi, keterbatasan akses terhadap transportasi ramah lingkungan, tidak adanya intervensi kepada masyarakat dalam kesadaran dampak polusi udara, maupun proses pelibatan kebijakan uji emisi. WALHI Jakarta menilai bahwa kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor terlalu rumit untuk dilaksanakan. Untuk mencapai pengurangan emisi yang signifikan, diperlukan kebijakan yang menyasar kepada seluruh masyarakat yang terdampak, seperti pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan penguatan sistem transportasi publik.¹⁰

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sheha Adhelia Octavianie dan Laila Kholid Al Firdaus dengan penulis yaitu pada fokus dan lokasi penelitian. Penulis fokus pada peran WALHI dalam meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat di TPA, sedangkan Sheha Adhelia Octavianie dan Laila Kholid Al Firdaus fokus pada kebijakan pengurangan emisi karbon. Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah berada di Kota Banda Aceh, sedangkan Wahyu Sheha Adhelia Octavianie dan Laila Kholid Al Firdaus berada di Jakarta.

¹⁰ Sheha Adhelia Octavianie dan Laila Kholid Al Firdaus, “Partisipasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta Dalam Advokasi Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021”, dalam *Jurnal Sosilogi*, 1(1), (2025).

B. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Kolektif Emile Durkheim

Teori kesadaran kolektif pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim pada tahun 1893 lewat karya “*De La Division Du Travail Social*” (pembagian kerja dalam masyarakat). Dalam Teori ini, Emile Durkheim menyatakan bahwa kesadaran kolektif adalah seperangkat keyakinan, ide, dan sikap moral bersama yang menyatukan masyarakat. Teori ini cukup berkaitan erat dengan konsep solidaritas sosial, yaitu teori ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai bersama membentuk kekuatan pemersatu dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks untuk memperkuat nilai-nilai tersebut.

Durkheim juga menyatakan bahwa kesadaran kolektif adalah seluruh kepercayaan bersama orang banyak dalam masyarakat yang akan menimbulkan sebuah sistem yang tetap dan memiliki kehidupan sendiri bersifat umum. Kesadaran kolektif tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan melalui kepercayaan dan sistem bersama. Kesadaran kolektif tidak dapat terlepas dari fakta sosial dan Durkheim pun tidak memungkiri kalau kesadaran kolektif dapat terwujud melalui kesadaran-kesadaran individu.¹¹

Kesadaran kolektif terdapat dalam kehidupan sebuah masyarakat ketika dia menyebut keseluruhan kepercayaan dan

¹¹ Zulkifli Razak, *Perkembangan Teori Sosial (Menyongsong Era PostModernisme)*, (Makassar: Sah Media, 2017), hlm. 8.

sentimen bersama. Durkheim memahami kesadaran kolektif sebagai sesuatu terlepas dari dan mampu menciptakan fakta sosial yang lain, kesadaran kolektif bukan hanya sekedar cerminan dari basis material. Kesadaran kolektif baru bisa terwujud melalui kesadaran-kesadaran individual.¹²

Teori kesadaran kolektif Durkheim berdasarkan dengan kesadaran kolektif bersama (*collective consciousness*), mengacu pada "keseluruhan keyakinan dan opini yang terbagi yang sebagian besar ada di antara individu-individu dari masyarakat yang sama. Teori kesadaran kolektif terdiri atas kesadaran individu, norma sosial serta perilaku sosial. Teori kesadaran kolektif pada masyarakat adalah nilai yang mempunyai sifat memaksa supaya masyarakat mengambil tindakan sesuai kebijakan dan telah diharuskan. kesadaran kolektif adalah bagian dari kebersamaan pada sistem sosial serta bisa mewujudkan dan terpeliharanya suatu lingkungan yang bersih dalam waktu yang lama.¹³

Kesadaran kolektif dengan seluruh kepercayaan serta perasaan bersama kebanyakan dalam sebuah masyarakat akan membentuk suatu sistem yang tetap atau mempunyai kehidupan sendiri. pikiran kolektif sebenarnya adalah sekumpulan pikiran individu. Tetapi pikiran individual tidak secara mekanis saling bersinggungan dan tertutup satu sama lain. Pikiran-pikiran

¹² Murniati Ruslan dkk, "Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup di Kelurahan Simpong" dalam *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), (2024), hlm. 12

¹³ Mohammad Syawaludin, *Teori Sosial Budaya dan Methodenstreit*, (Palembang: CV. Amanah, 2017), hlm. 85

individual terus-menerus berinteraksi melalui pertukaran simbol: mereka mengelompokkan diri berdasarkan hubungan alami mereka, mereka menyusun dan mengatur diri mereka sendiri.¹⁴

Dalam pandangan Durkheim, kesadaran kolektif dan kesadaran individual itu sangat berbeda sebagaimana perbedaan antara kenyataan sosial dengan kenyataan psikologis murni. Masyarakat terbentuk bukan karna sekedar kontrak sosial, melainkan lebih dari itu atas dasar kesadaran kelompok (*colective conciousness*). Terdapat dua sifat kesadaran kolektif, yakni *exterior* dan *constraint*. *Exterior* merupakan kesadaran yang berada di luar individu, yang sudah mengalami proses internalisasi ke dalam individu dalam wujud aturan-aturan moral, agama, nilai (baik-buruk, luhur mulia), dan sejenisnya. *Constraint* adalah kesadaran kolektif yang memiliki daya paksa terhadap individu, dan akan mendapat sanksi tertentu jika hal itu dilanggar.

Kesadaran kolektif itu adalah suatu konsensus masyarakat yang mengatur hubungan sosial diantara masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran kolektif ini merupakan bentuk tertinggi dari kehidupan psikis/kejiwaan dan merupakan suatu „kesadaran dari kesadaran yang berada di luar dan di atas individu - individu dan dengan kesadaran yang demikian itu maka masyarakat adalah merupakan suatu yang lebih baik dari pada individu.¹⁵

¹⁴ Paulina Virgianti dan Silfia Hanani, “Pendidikan Moral Perspektif Emile Durkheim Relevansinya Bagi Pendidikan di Indonesia”, dalam *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(4), (2023), hlm. 168.

¹⁵ Wahyuni, *Teori Sosiologi Klasik*, (Makassar: Rumah Buku Carabaca, 2017), hlm. 104.

Berbicara terkait kesadaran kolektif, tentunya tidak terlepas dari solidaritas sosial, Emile Durkheim menyatakan solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Durkheim membagi solidaritas sosial menjadi dua bentuk yaitu solidaritas organik dan mekanik, untuk penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:¹⁶

a. Solidaritas sosial organik

Solidaritas organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar. Solidaritas itu didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dan pembagian pekerjaan, yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan di kalangan individu. Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks, yaitu masyarakat yang mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian. Dapat dikatakan bahwa pada solidaritas organik ini menyebabkan masyarakat yang ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, karena adanya saling ketergantungan ini maka ketidakhadiran

¹⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 145.

pemegang peran tertentu akan mengakibatkan gangguan pada sistem kerja dan kelangsungan hidup masyarakat. Keadaan masyarakat dengan solidaritas organik ini merupakan ikatan utama yang mempersatukan masyarakat bukan lagi kesadaran kolektif melainkan kesepakatan yang terjalin diantara berbagai kelompok profesi.

b. Solidaritas sosial mekanik

Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama (*collective consciousness/conscience*), dimana mereka mempunyai kesadaran untuk hormat kepada ketaatan karena nilai-nilai keagamaan yang masih tinggi, menandai masyarakat yang masih sederhana, kelompok manusia tinggal tersebar, masing-masing anggota pada umumnya dapat menjalankan peran yang diperankan oleh orang lain, pembagian kerja belum berkembang dan hukuman yang terjadi bersifat represif yang dibalas dengan penghinaan terhadap kesadaran kolektif sehingga memperkuat kekuatan diantara mereka. Durkheim berpendapat bahwa masyarakat primitive memiliki kesadaran kolektif yang lebih kuat yaitu pemahaman norma dan kepercayaan bersama. Peningkatan pembagian kerja menyebabkan menyusutnya kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif lebih terlihat dalam masyarakat yang ditopang oleh solidaritas mekanik daripada masyarakat yang ditopang oleh solidaritas organik

Masyarakat yang ditandai dengan solidaritas mekanik cenderung bersatu dan lebih bersifat komunal. Sedangkan dalam masyarakat organik, masing masing melakukan kegiatan dengan pembagian kerja, sehingga berbeda tugas dan tanggung jawabnya. Masyarakat dengan ciri solidaritas organik cenderung lebih individual. Berikut merupakan perbedaan dua tipe solidaritas sosial menurut Emile Durkheim yang dapat dilihat sebagai berikut:

17

Tabel 2.1 Tipe Masyarakat Menurut Emile Durkheim

Penanda	Solidaritas Organik	Solidaritas Mekanik
Masyarakat	Modern	Tradisional
Pembagian Kerja	Spesialisasi	Rendah, Generalisasi
Sifat Hukum	Restitutif	Represif
Kesadaran Kolektif	Rendah	Tinggi
Aksentuasi	Perbedaan Individu	Persamaan Kolektif

Sumber: Arifuddin M. Arif (2020)

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang memberikan penjelasan mendetail tentang cara mengukur suatu variabel

¹⁷ Arifuddin M. Arif, “Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan”, dalam *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), (2020), hlm. 7.

penelitian sehingga dapat memberikan penjelasan dan kemudahan dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan definisi operasional pada penelitian ini:

1. Peran

Menurut KBBI peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan tertentu di masyarakat. secara umu, peran adalah tugas, fungsi, atau tindakan yang diharapkan dari seseorang sesuai posisinya. Secara sosiologi peran adalah Konsep atau orientasi perilaku yang dimainkan oleh individu dalam posisi sosial tertentu, sesuai harapan lingkungan sosialnya.¹⁸

Peran yang dimaksud pada penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh WALHI dalam memberikan dan membangun kesadaran ekologis masyarakat di Gampong Jawa Kota Banda Aceh khususnya dalam menjaga lingkungan.

2. WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau yang dikenal WALHI adalah organisasi lingkungan hidup terbesar dan tertua di Indonesia yang berfokus pada pelestarian alam dan advokasi keadilan lingkungan. WALHI merupakan bagian dari jaringan Friends of the Earth International (FoEI). WALHI yang telah berdiri pada tahun 1980. WALHI

¹⁸ Edi Suhardono. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio-Digital*, (Sidoarjo: Zifatama Press, 2025), hlm. 15.

menyatukan berbagai kelompok dan individu untuk memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat, termasuk isu-isu seperti konflik agraria, hak masyarakat adat, dan perubahan iklim.¹⁹

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada advokasi dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai lembaga advokasi, WALHI secara aktif terlibat dalam advokasi kebijakan, melakukan kampanye, serta mengedukasi masyarakat tentang isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, WALHI melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dan visinya. WALHI juga terlibat dalam penyebaran informasi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup serta hak-hak mereka terhadap lingkungan yang sehat.²⁰

WALHI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah WALHI yang berada di Kota Banda Aceh dan melihat upaya yang dilakukan terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya bagi masyarakat di Gampong Jawa Banda Aceh.

¹⁹Boy Jerry Even Sembiring, *Ekonomi Nusantara: Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia*, (Jakarta: WALHI Press, 2021), hlm. 4.

²⁰ Sahvina Tesya Putri dkk, "Advokasi Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) SUMSEL dalam Pencegahan Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir", dalam *communnity Development Journal*, 5(5), (2024), hlm. 9975.

3. Kesadaran Ekologis

Menurut KBBI, kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, atau hal yang dirasakan/dialami seseorang, menunjukkan kondisi di mana seseorang memahami dirinya, lingkungannya, dan hak kewajibannya, seringkali terkait dengan pemahaman akan diri sendiri dan situasi yang ada. Secara sosial, kesadaran adalah pengetahuan yang terbentuk melalui interaksi dengan agen lain dan lingkungannya (misalnya, mengetahui apa yang terjadi di sekitar rekan kerja).

²¹

Menurut KBBI, ekologis berasal dari kata dasar ekologi yang artinya ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam di sekitarnya (lingkungan). Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani yakni *oikos* yang berarti rumah, habitat, sedangkan *logos* berarti ilmu. Sebagai ilmu, ekologi dijadikan dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan.²²

Kesadaran ekologis adalah pemahaman mendalam, kepedulian, dan rasa tanggung jawab terhadap hubungan antara manusia dengan lingkungan, yang mendorong perubahan pola pikir dan perilaku untuk hidup selaras dengan

²¹ Bernardo Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Yogyakarta: Ledalero, 2021), hlm. 160

²² Olis Bakari, "Peluang dan Tantangan Mewujudkan Keadilan Ekologis dan Sosial pada Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai", dalam *Journal of Global and Multidisciplinary*, 3(2), (2025), hlm. 4915.

alam demi keberlanjutan bersama, bukan hanya sekadar pengetahuan, tapi juga melibatkan dimensi kognitif, afektif, dan konatif (tindakan nyata). Ini mencakup pengakuan bahwa setiap tindakan manusia berdampak pada alam dan komitmen untuk melestarikan sumber daya alam.

Kesadaran ekologis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran masyarakat Gampong Jawa Kota Banda Aceh terhadap lingkungan sekitar wilayahnya sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan menjaga kebersihan lingkungan.

4. TPA

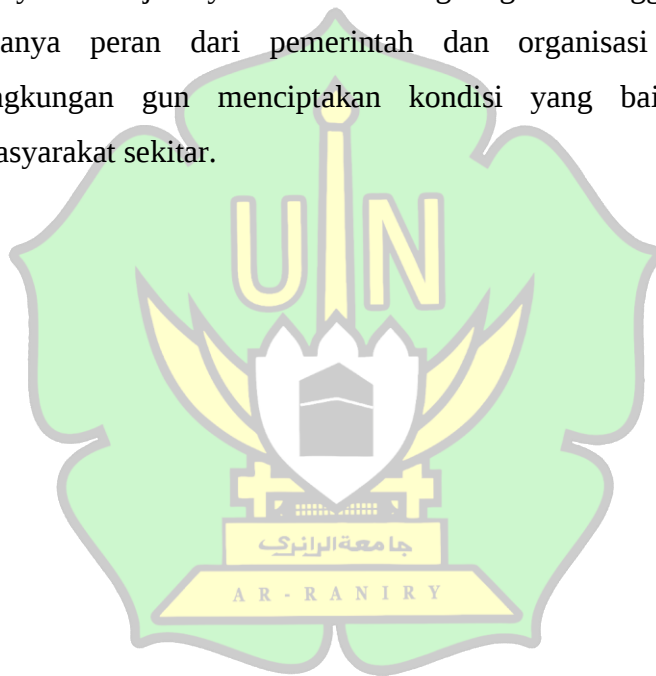
TPA merupakan singkatan dari Tempat Pemrosesan Akhir, TPA adalah fasilitas untuk mengolah dan mengisolasi sampah secara aman agar tidak membahayakan lingkungan. Di TPA, sampah diolah melalui berbagai sistem seperti *sanitary landfill* atau *controlled landfill* untuk memadatkan, menutup, dan menimbun sampah dengan tanah agar tidak menimbulkan gangguan bagi manusia dan lingkungan.²³

Menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, TPA atau tempat pemrosesan Akhir yang bertujuan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. TPA berfungsi untuk memproses sampah setelah

²³ Khoiruddin Al-Amin dan Deded Chandra, “Dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terhadap Masyarakat di Sekitar TPA Air Dingin Kota Padang”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, 4(4), (2024), hlm. 531.

tahap pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan lainnya. Tujuannya adalah mengembalikan sampah ke media lingkungan dengan cara yang aman.

TPA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang berada di Gampong Jawa Kota Banda Aceh, TPA ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan sehingga perlu adanya peran dari pemerintah dan organisasi terkait lingkungan guna menciptakan kondisi yang baik bagi masyarakat sekitar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian akan dilaksanakan, lokasi penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian, karena dapat mempengaruhi kualitas dan keandalan data, memberikan kemudahan akses data dan sumber daya. Lokasi pada penelitian ini berada di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan pada lokasi ini terdapat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, sehingga sesuai dengan masalah yang peneliti lakukan yaitu untuk melihat peran WALHI dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, , Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode utama dalam penelitian sosial, yang fokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik untuk memahami konsep, opini, atau pengalaman.²⁴ Penelitian kualitatif sering diistilahkan “naturalistik”, yaitu pelaksanaan penelitian terjadi secara ilmiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan data dan kondisi, menekankan pada

²⁴Muhammad Najib Husein dkk, *Pengantar Penelitian Sosial*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm. 24.

deskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjarangan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya dikenal dengan sebutan pengambilan data secara alami atau naturalistik.²⁵

Alasan menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah untuk memberikan gambaran dan mendeskripsikan hasil berdasarkan observasi atau pengamatan di lapangan yang tentunya akan menyesuaikan dengan teori yang digunakan terkait dengan peran WALHI dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat terhadap TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sumber data dalam hal ini orang yang dianggap paling tahu terkait permasalahan penelitian dan dapat memberikan informasi yang sesungguhnya sehingga dapat memberikan jawaban pada penulis dalam menyusun dan menganalisis penelitian. Penentuan informan pada penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Informan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggota WALHI Kota Banda Aceh
2. Aparatur Desa Masyarakat Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2018), hlm. 59.

²⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 163.

3. Masyarakat Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh
4. Pihak Pengelola Sampah di TPA Gampong Jawa

D. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data penelitian. Sumber data dari penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder, sebagaimana yang dapat dilihat di bawah ini:²⁷

1. Sumber data primer.

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang datanya dikumpulkan atau diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara, survei dan observasi. Dalam penelitian ini sumber data primer penulis peroleh berdasarkan hasil observasi atau melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, dan juga diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, sehingga dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini.

2. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung atau data yang sudah ada dan tersedia. Data sekunder pada penelitian ini penulis peroleh dari jurnal ilmiah, website dan juga dokumentasi di lapangan.

²⁷ Abdul Rahman dkk, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 171-172.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk dapat mengumpulkan data atau informasi berdasarkan fakta pendukung yang ada di lapangan demi keperluan penelitian.²⁸ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono, observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat langsung keadaan dilapangan, mengamati, serta mencatat informasi yang diperoleh dari pengamatan tersebut. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penulis melakukan pengamatan dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian dan juga mencari informasi serta mencatat informasi penting terkait permasalahan penelitian.

2. Wawancara (*Interview*) - R A N I R Y

Menurut Sugiyono, wawancara merupakan kegiatan tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yang mana komunikan akan mengajukan beberapa pertanyaan dan informan akan memberikan respon berupa menjawab pertanyaan tersebut (Sugiyono, 2019:94). Penulis melakukan wawancara dengan informan penelitian, penulis

²⁸ Abdul Rahman dkk, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 194-195.

mempersiapkan beberapa pertanyaan terkait permasalahan penelitian, yang juga pertanyaan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan masing-masing informan sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban pada penelitian.

3. Dokumentasi.

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang dianggap penting, dan bisa dijadikan sebagai referensi untuk memperkuat penelitian yang dilakukan. Dokumentasi yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan dokumentasi terkait dengan TPA Kota Banda Aceh, kegiatan WALHI, dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah model Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Penyajian data

Peneliti mengumpulkan seluruh informasi yang didapat dan menyusunnya, serta membuat suatu pijakan yang akan disajikan sebagai dasar dalam membuat sebuah kesimpulan. Pada tahapan ini peneliti lebih banyak terlibat dalam kegiatan

²⁹ Leny J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 97.

penyajian data (*display*) dari data yang dikumpulkan, serta menganalisis data tersebut agar lebih mudah dalam membuat teks naratif yang bersesuaian dengan data yang ada.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, serta menyederhanakan data dari catatan tertulis yang dikumpulkan melalui observasi lapangan dan pengamatan di lapangan yang bertujuan agar memudahkan dalam menggunakan isi dari data tersebut.

3. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian sedang berlangsung. Verifikasi ditahap ini berupa tinjauan ulang dari pemikiran seorang peneliti yang merupakan hasil dari catatan lapangan yang telah dikumpulkan selama penelitian dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Gampong Jawa

1. Kondisi Geografis dan Demografis Gampong Jawa

Gampong Jawa adalah salah satu nama Desa yang berada di Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Gampong Jawa terletak di pinggir Krueng Aceh. Luas Desa Gampong Jawa adalah 150,60 Ha, yang terdiri atas 5 (lima) Jurong, yaitu Jurong Nyak Raden, Jurong Hamzah Yunus, Jurong Tuan Dibanda, Jurong Said Usman dan Jurong Tgk Muda yang setiap Jurongnya Dipimpin oleh seorang Ulee Jurong.

Gampong Jawa juga kerap disebut sebagai desa nelayan karena lokasinya yang berada di pesisir (berdekatan dengan laut). Tidak banyak yang mengetahui mengapa desa ini diberi nama Gampong Jawa, namun sejumlah warga mengatakan konon ditempat ini dahulu banyak menetap pendatang dari pulau Jawa sehingga tempat ini diberi nama Gampong Jawa, Para pendatang dari pulau Jawa itu bukan khusus datang untuk menetap di Gampong Jawa ini, tetapi mereka dalam perjalanan pulang dari Tanah Suci Mekkah, mereka yang pulang dari Mekkah itu tidak langsung pulang ke tempat asalnya melainkan mampir disini bahkan sebahagian dari mereka ada yang menetap di Gampong Jawa ini untuk memperdalam ilmu agama sehingga daerah ini diberi nama Gampong Jawa.

Secara administrasi, Gampong Jawa berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Peulanggahan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pande
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Krueng Aceh

Jumlah penduduk di Gampong Jawa pada tahun 2025 menurut data Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh adalah sebanyak 3.510 jiwa dengan rincian 1.768 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.742 berjenis kelamin perempuan. Selain itu, jumlah Kartu Keluarga (KK) di Desa ini berjumlah sebanyak 1.005 KK.

Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan laut dan sungai menjadikan sektor perikanan sebagai pilar ekonomi utama, sehingga Gampong Jawa dikenal luas sebagai desa nelayan. Sebagian besar penduduk laki-laki menggantungkan hidupnya sebagai nelayan tangkap maupun pekerja di sektor pendukung perikanan. Namun, keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah kota di wilayah ini juga menciptakan struktur ekonomi lainnya. Banyak warga yang berprofesi sebagai pemulung atau pekerja sektor informal yang melakukan pemilahan barang ekonomis dari sampah. Selain itu, sebagian masyarakat lainnya bergerak di sektor perdagangan kecil dan jasa guna melayani kebutuhan warga lokal maupun aktivitas di sekitar pesisir dan kawasan TPA.

2. Keberadaan dan Sejarah TPA Gampong Jawa

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gampong Jawa merupakan fasilitas pengolahan sampah utama bagi Kota Banda Aceh yang telah dibangun tahun 1994 dengan luas 12 Ha. Lokasinya yang berada di ujung tanjung dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka menjadikan tempat ini sebagai titik sentral manajemen limbah perkotaan. Pada peristiwa Tsunami 2004, kawasan ini mengalami kerusakan parah, dan dilakukan rehabilitasi serta diperluas menjadi 21 Ha. TPA Gampong Jawa direhabilitasi pada tahun 2008 oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dan mulai beroperasi secara sanitary landfill (sampah ditimbun harian) pada Januari 2009. Berikut merupakan gambar dari TPA Gampong Jawa:

Gambar 4.1 Wilayah TPA Gampong Jawa



Sumber: Dokumentasi DLHK3 Kota Banda Aceh (2026)

Untuk penutupan sampah ini, setiap tahunnya dibutuhkan tidak kurang dari 5000 m³ tanah dan 3500 m³ kompos. Kompos digunakan untuk mengurangi bau tak sedap yang ditimbulkan oleh sampah. Seiring berjalannya waktu, volume sampah yang masuk terus meningkat hingga mencapai kondisi overload (melampaui kapasitas). Hal ini memicu krisis lingkungan kronis yang menjadi latar belakang keterlibatan organisasi lingkungan seperti WALHI Aceh untuk mengadvokasi pemulihan hak ekologis masyarakat sekitar yang terdampak oleh polusi gas metana dan limbah lindi.

3. Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Gampong Jawa

Masyarakat Gampong Jawa memiliki karakteristik sosial yang kental dengan identitas sosio-religius sebagaimana masyarakat Aceh, di mana nilai-nilai keislaman dan adat istiadat menjadi pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya kepatuhan terhadap figur otoritas seperti Teungku (tokoh agama) menciptakan struktur sosial yang baik. Selain itu, karena kedekatan geografis yang dengan TPA dalam kurun waktu puluhan tahun, telah terbentuk sebuah fenomena “normalisasi pencemaran”. Hal ini membuat warga cenderung terbiasa terhadap bau menyengat dan pemandangan sampah karena sudah dianggap sebagai bagian dari keseharian. Ruang-ruang kultural seperti warung kopi dan balai gampong menjadi pusat interaksi sosial yang sangat penting, yang kemudian dimanfaatkan sebagai basis edukasi non-formal untuk membangun kembali kesadaran ekologis warga.

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat terkait TPA

Ekonomi masyarakat Gampong Jawa menunjukkan ketergantungan yang kompleks terhadap keberadaan TPA. Selain sektor perikanan bagi nelayan, TPA telah menciptakan lapangan kerja informal yang cukup luas bagi warga setempat. Profesi sebagai pemulung menjadi sumber pendapatan utama atau tambahan bagi banyak keluarga untuk memenuhi kebutuhan materiil jangka pendek. Realitas ekonomi ini menciptakan hambatan struktural dalam upaya pelestarian lingkungan, di satu sisi masyarakat merasakan dampak kesehatan dari polusi TPA, namun di sisi lain mereka memiliki kecemasan bahwa perbaikan tata kelola atau penutupan TPA akan mengancam kelangsungan rezeki mereka. Kondisi ekonomi yang menantang ini memaksa warga untuk memprioritaskan stabilitas finansial keluarga di atas risiko ekologis jangka panjang.

B. Peran Walhi dalam Membangun Kesadaran Ekologis Masyarakat terhadap TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh

Persoalan lingkungan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gampong Jawa bukan sekadar masalah teknis penumpukan sampah, melainkan juga masalah sosial yang berkaitan dengan rendahnya literasi ekologis dan keterbatasan akses masyarakat dalam mengadvokasi hak-hak lingkungan mereka. Dalam konteks ini, keberadaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menjadi krusial sebagai agen perubahan (*agent of change*)

sekaligus fasilitator antara kepentingan masyarakat dengan kelestarian alam.

WALHI Aceh tidak hanya berperan sebagai pengawas kebijakan, tetapi juga melakukan upaya sistematis untuk merekonstruksi paradigma masyarakat Gampong Jawa agar lebih peduli dan kritis terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Melalui berbagai program pendampingan, WALHI berupaya menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa lingkungan yang sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diperjuangkan.

Untuk mendalami sejauh mana peran tersebut diimplementasikan dan dampaknya terhadap masyarakat di sekitar TPA, peneliti telah melakukan serangkaian wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, mulai dari internal WALHI Aceh, aparat gampong, masyarakat terdampak, dan pihak pengelola sampah. Fokus analisis dalam bagian ini mencakup sejarah keterlibatan, metode pendekatan yang digunakan, hingga efektivitas program dalam mengubah perilaku masyarakat lokal.

1. Latar Belakang Keterlibatan dan Program Kerja WALHI

Untuk memahami sejauh mana peran WALHI Aceh dalam membangun kesadaran masyarakat, peneliti terlebih dahulu menelusuri akar kesejarahan dan motivasi lembaga tersebut dalam mengawal isu lingkungan di lokasi penelitian. Mengenai kronologi keterlibatan dan latar belakang yang mendasari urgensi advokasi

di TPA Gampong Jawa, informan dari perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

“Secara historis, WALHI Aceh sudah mulai memberikan perhatian pada isu TPA Gampong Jawa sejak awal tahun 2000-an, namun keterlibatan yang lebih intensif dan sistematis melalui pendampingan masyarakat dimulai sekitar tahun 2018. Latar belakang keterlibatan kami didorong oleh keprihatinan atas kondisi TPA yang sudah mencapai titik jenuh atau overload. Kami melihat adanya ancaman serius terhadap hak-hak ekologis warga, mulai dari pencemaran air (sumur), hingga masalah polusi udara yang terus menghantui. Sebagai organisasi lingkungan, kami merasa bertanggung jawab untuk mengedukasi warga agar mereka tidak hanya menjadi penonton dari kerusakan lingkungan di tanah mereka sendiri, tetapi menjadi aktor utama yang menuntut perbaikan tata kelola sampah di Kota Banda Aceh”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa keterlibatan WALHI Aceh dalam isu TPA Gampong Jawa dimulai pada tahun 2000-an, namun lebih aktif terlibat pada tahun 2018, hal ini merupakan bentuk respon terhadap krisis lingkungan yang bersifat kronis. Motivasi utama organisasi ini bukan sekadar persoalan teknis pembuangan sampah, melainkan upaya pemulihan hak ekologis masyarakat yang terancam akibat kondisi TPA yang sudah melampaui kapasitas (overload). Fokus utama WALHI adalah mentransformasi peran masyarakat dari sekadar korban terdampak (passive victims) menjadi aktor aktif yang memiliki kesadaran kritis untuk menuntut perbaikan lingkungan.

³⁰ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

Dengan demikian, latar belakang keterlibatan ini menjadi fondasi bagi WALHI dalam menyusun strategi edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan di Gampong Jawa.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat di sekitar TPA Gampong Jawa, WALHI Aceh telah menginisiasi berbagai program kerja yang bersifat edukatif maupun partisipatif. Mengenai rincian program dan kegiatan yang telah dijalankan tersebut, informan yaitu perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

“Program utama kami di Gampong Jawa berfokus pada literasi sampah dan advokasi lingkungan. Kami rutin melaksanakan kegiatan seperti 'Sekolah Ekologi' tingkat tapak, di mana kami mengajak warga untuk melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik langsung dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Selain itu, kami juga mengadakan diskusi publik rutin dan kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai agar beban sampah yang masuk ke TPA Gampong Jawa tidak terus meningkat secara drastis.”³¹

Informan lainnya, yaitu aparatur desa di Gampong Jawa menyatakan bahwa:

“Kalau dari pengamatan kami, WALHI cukup aktif dalam membuat kegiatan sosialisasi di balai desa. Mereka pernah membuat pelatihan pembuatan pupuk kompos dari sampah organik untuk kelompok ibu-ibu PKK di sini. Selain itu, mereka sering mendampingi warga dalam aksi-aksi penyampaian aspirasi terkait pengelolaan limbah TPA

³¹ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

*yang masuk ke pemukiman. Sehingga hal ini tentunya sangat positif bagi masyarakat gampong kami.”*³²

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program kerja yang diterapkan oleh WALHI Aceh dalam membangun kesadaran ekologis di Gampong Jawa, yakni melalui pendekatan edukasi teknis dan pendampingan advokasi. Program 'Sekolah Ekologi' dan pelatihan pembuatan kompos menunjukkan upaya nyata untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah dari skala rumah tangga. Sementara itu, keterlibatan WALHI dalam mendampingi penyampaian aspirasi warga mengindikasikan peran lembaga tersebut sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat terdampak dengan pihak pembuat kebijakan. Sinergi antara kegiatan edukatif yang menysasar kelompok strategis seperti ibu-ibu PKK dengan aksi advokasi lapangan menciptakan pola pemberdayaan yang komprehensif, sehingga keberadaan WALHI dirasakan manfaatnya secara langsung oleh perangkat maupun masyarakat gampong.

Keberhasilan dalam membangun kesadaran masyarakat sangat bergantung pada efektivitas metode pendekatan yang digunakan. Sebagai organisasi lingkungan yang telah lama mendampingi isu TPA Gampong Jawa, WALHI Aceh memiliki strategi khusus (metode) dalam melakukan pendekatan sosial

³² Hasil wawancara peneliti bersama AK yang merupakan perwakilan aparaturnya desa Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

kepada masyarakat lokal. Terkait pola pendekatan tersebut, informan dari perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

“Kami menggunakan metode pendekatan partisipatif. Artinya, kami tidak memposisikan diri sebagai guru yang hanya memberi teori, tetapi kami memposisikan diri sebagai mitra warga. Kami masuk melalui ruang-ruang santai, seperti diskusi di warung kopi atau menghadiri pertemuan-pertemuan rutin warga. Pendekatan kami bersifat persuasif-edukatif; kami mengajak warga memetakan sendiri masalah di lingkungan mereka, merasakan sendiri apa dampaknya jika TPA tidak dikelola dengan baik, hingga akhirnya tumbuh kesadaran organik dari dalam diri mereka untuk bergerak bersama.”³³

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh WALHI Aceh dalam membangun kesadaran masyarakat di Gampong Jawa mengandalkan pendekatan partisipatif-dialogis yang mengedepankan kesetaraan antara aktivis dan warga. Dengan memilih ruang-ruang kultural seperti warung kopi dan pertemuan rutin sebagai basis edukasi, WALHI berhasil meminimalisir jarak sosial dan resistensi yang kerap muncul dalam model sosialisasi formal. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan secara searah, tetapi juga mendorong munculnya kesadaran organik melalui proses identifikasi masalah secara mandiri oleh masyarakat. Melalui pola persuasif-edukatif ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek program, melainkan sebagai subjek yang

³³ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

mampu memetakan dampak lingkungan serta memiliki kemauan internal untuk terlibat dalam aksi kolektif demi perbaikan kualitas hidup mereka

Program kerja yang diterapkan WALHI dalam membangun kesadaran masyarakat tidak hanya terpaku pada satu metode, melainkan melalui berbagai pendekatan seperti sosialisasi, diskusi, hingga pendampingan langsung. Maka dari itu, mengenai hal tersebut, informan yaitu perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

“Kami menerapkan konsep 'Edukasi Berbasis Aksi'. Bentuknya tidak hanya sosialisasi satu arah, tapi lebih banyak ke diskusi publik dan advokasi. Misalnya, saat warga mengeluh soal bau atau limbah cair TPA, kami masuk di sana untuk melakukan pendampingan sekaligus mengedukasi mereka tentang hak-hak lingkungan. Kampanye juga kami lakukan melalui media sosial dan pembagian selebaran agar jangkauan informasinya lebih luas bagi warga yang tidak sempat hadir di pertemuan fisik.”³⁴

Informan lainnya, yaitu salah satu masyarakat di Gampong Jawa juga menyatakan bahwa:

“Kalau saya pribadi pernah mengikuti kegiatan yang dilakukan bersama WALHI. Di sana mereka jelaskan soal bahaya sampah. Selain itu, mereka juga membantu kami untuk bersama-sama melakukan penanganan pencemaran air yang ada di sumur kami. Mereka kasih tahu kami cara bicara ke pemerintah supaya masalah lingkungan di Gampong Jawa ini diperhatikan lebih serius.”³⁵

³⁴ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

³⁵ Hasil wawancara peneliti bersama MR yang merupakan masyarakat desa Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa metode yang diterapkan oleh WALHI Aceh dalam menerapkan program kegiatan yaitu melalui kombinasi metode kognitif, visual, dan partisipatif. Penggunaan konsep 'Edukasi Berbasis Aksi' menunjukkan bahwa proses pembelajaran masyarakat tidak hanya terjadi melalui transfer informasi searah (sosialisasi), tetapi juga melalui keterlibatan langsung dalam merespons isu faktual, seperti pencemaran air sumur dan polusi bau. Edukasi yang dilakukan telah menyentuh aspek literasi hak lingkungan, di mana masyarakat mulai memahami posisi mereka sebagai subjek yang berhak menuntut perbaikan tata kelola kepada pemerintah. Selain itu, penggunaan media kampanye fisik seperti spanduk dan selebaran di titik-titik strategis memastikan pesan ekologis tetap hadir secara berkelanjutan dalam ruang publik masyarakat Gampong Jawa.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang keterlibatan WALHI Aceh di Gampong Jawa telah dimulai sejak tahun 2000-an dan tereskalasi secara lebih aktif pada tahun 2018 sebagai respons atas krisis lingkungan akibat kondisi TPA yang melebihi kapasitas (*overload*). Keterlibatan ini bertujuan untuk memulihkan hak ekologis masyarakat dan mentransformasi warga dari korban terdampak menjadi aktor aktif yang memiliki kesadaran kritis. Program kerja yang diimplementasikan mencakup pendekatan edukasi teknis melalui edukasi ekologi dan pelatihan pengomposan, serta pendampingan

advokasi sebagai jembatan aspirasi warga kepada pembuat kebijakan. Program kerja diterapkan melalui metode dengan menerapkan strategi partisipatif-dialogis di ruang kultural dan metode edukasi berbasis aksi, WALHI Aceh berhasil membangun literasi hak lingkungan serta mendorong kemandirian masyarakat dalam upaya perbaikan kualitas hidup secara kolektif.

2. Bentuk Edukasi dan Sasaran Program WALHI

Edukasi merupakan cara yang dilakukan untuk memberikan sosialisasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat. Edukasi yang berhasil dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga edukasi sangat penting diterapkan. Sehingga edukasi merupakan salah satu cara atau merupakan salah satu yang menjadi bagian dari program kerja yang diterapkan oleh WALHI Aceh. mengenai edukasi yang dilakukan oleh WALHI Aceh, informan yaitu perwakilan dari WALHI Aceh menyatakan bahwa:

“Edukasi yang kami lakukan yaitu fokus pada edukasi terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan bahaya lingkungan yang tercemar. Kami memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui efek dari bahaya lingkungan terhadap kesehatan dan hak-hak apa saja yang berhak didapatkan oleh masyarakat terhadap lingkungan. Edukasi kami lakukan dengan cara melakukan diskusi kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan dan juga melalui penyebaran-penyebaran selebaran

*informasi, hal ini kami lakukan agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat”*³⁶

Informan lainnya yaitu aparaturnya desa di Gampong Jawa menyatakan bahwa:

*“Sejauh ini yang kami lihat, bentuk edukasi dari WALHI seringnya melalui diskusi-diskusi di kantor desa atau balai gampong. Mereka biasanya mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda untuk bicara soal dampak lingkungan. Kadang mereka juga buat spanduk-spanduk imbauan di titik-titik strategis dekat TPA. Jadi masyarakat sering diingatkan melalui tulisan-tulisan kampanye tersebut.”*³⁷

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa bentuk edukasi yang diterapkan oleh WALHI Aceh berfokus pada pemberian pemahaman mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta dampak negatif pencemaran terhadap kesehatan dan hak-hak ekologis warga. Metode edukasi dilakukan melalui pendekatan dialogis dan kampanye visual secara langsung di lapangan. Hal ini mencakup pelaksanaan diskusi tatap muka di kantor desa atau balai gampong dengan melibatkan tokoh masyarakat serta pemuda untuk membahas isu-isu lingkungan faktual. Selain itu, WALHI Aceh juga menggunakan media literasi fisik seperti penyebaran selebaran informasi dan pemasangan spanduk imbauan di titik-titik strategis sekitar TPA sebagai sarana

³⁶ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

³⁷ Hasil wawancara peneliti bersama AK yang merupakan perwakilan aparaturnya desa Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

kampanye untuk terus mengingatkan masyarakat mengenai kondisi lingkungan mereka secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan program-program kesadaran ekologis, WALHI Aceh menetapkan sasaran atau kelompok target yang spesifik untuk memastikan pesan lingkungan dapat tersampaikan secara efektif di Gampong Jawa. Mengenai pihak-pihak yang menjadi prioritas utama dalam kegiatan tersebut, informan yaitu perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

“Sasaran kami sebenarnya mencakup seluruh lapisan masyarakat, namun kami memprioritaskan beberapa kelompok strategis. Pertama adalah pemuda, karena mereka adalah penggerak yang melek teknologi untuk kampanye. Kedua adalah ibu rumah tangga, karena mereka adalah 'manajer' sampah di rumah masing-masing yang menentukan apakah sampah itu dapat dipilah atau tidak. Selain itu, kami juga mulai mendekati pemulung di sekitar TPA, bukan untuk melarang kerja mereka, tapi memberikan pemahaman tentang keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan”³⁸

Informan lainnya yaitu aparaturnya desa di Gampong Jawa menyatakan bahwa:

“Kalau saya perhatikan, saat WALHI membuat kegiatan di balai desa, yang paling banyak terlibat itu memang ibu-ibu PKK dan kelompok pemuda. WALHI juga aktif berkoordinasi dengan kami para aparaturnya gampong untuk penyelarasan aturan desa. Kadang mereka juga mengajak tokoh agama atau Teungku di sini untuk menyelipkan pesan kebersihan di sela-sela pengajian. Jadi mereka mencoba

³⁸ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

merangkul semua, tapi yang paling terlihat aktif ya pemuda dan ibu-ibu tadi”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penentuan sasaran program oleh WALHI Aceh dilakukan secara terukur dengan menyasar kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh signifikan dalam struktur sosial dan domestik masyarakat Gampong Jawa. Fokus pada kelompok pemuda dan ibu rumah tangga merupakan langkah strategis untuk mengintervensi kebiasaan pengelolaan sampah dari unit terkecil (keluarga) sekaligus memanfaatkan energi penggerak sosial di desa. Selain itu, upaya WALHI dalam merangkul aktor-aktor lokal seperti tokoh agama dan aparat gampong menunjukkan adanya integrasi nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam proses edukasi. Dengan melibatkan pemulung sebagai kelompok terdampak langsung, WALHI tidak hanya membangun kesadaran ekologis secara umum, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan dan kesehatan kerja berbasis komunitas di lingkungan TPA.

Isu pengelolaan dampak TPA merupakan persoalan kompleks yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. Terkait jalinan kemitraan yang dibangun oleh WALHI, baik dengan struktur pemerintahan tingkat gampong maupun instansi pemerintah lainnya, informan yaitu perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

³⁹ Hasil wawancara peneliti bersama AK yang merupakan perwakilan aparat gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

“Kami menyadari bahwa WALHI tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, kami membangun kerja sama formal dan informal dengan desa gampong Jawa. Bentuknya berupa koordinasi kebijakan tingkat desa, seperti penyusunan aturan gampong terkait pengelolaan sampah. Selain itu, kami juga membangun komunikasi dengan DLHK3 Banda Aceh, meskipun sering kali posisi kami sebagai pengkritik, namun tujuannya tetap untuk perbaikan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan”⁴⁰

Informan lainnya yaitu aparat desa di Gampong Jawa menyatakan bahwa:

“Hubungan kami dengan WALHI sangat terbuka, bentuk kerjasamanya biasanya dalam memfasilitasi pertemuan dengan warga. Setiap ada program edukasi, mereka selalu menyurati dan duduk bersama kami dulu. Kami terbantu karena WALHI bisa menjembatani aspirasi warga kami ke pemerintah kota atau provinsi yang terkadang sulit kami jangkau sendiri secara birokrasi”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa WALHI Aceh menerapkan pola pendekatan melalui metode partisipatif yang inklusif. Dengan memposisikan diri sebagai mitra dan memanfaatkan ruang-ruang kultural masyarakat, WALHI berhasil menghilangkan hambatan komunikasi yang biasanya bersifat kaku antara aktivis dan warga. Pendekatan persuasif-edukatif ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mengenali masalahnya secara

⁴⁰ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

⁴¹ Hasil wawancara peneliti bersama AK yang merupakan perwakilan aparat desa Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

mandiri. Hal ini sangat krusial agar kesadaran ekologis yang terbentuk bersifat organik dan berkelanjutan, bukan sekadar kepatuhan sementara terhadap program tertentu.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bentuk edukasi yang diterapkan oleh WALHI Aceh berfokus pada penguatan pemahaman mengenai kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan literasi hak ekologis melalui pendekatan dialogis serta kampanye visual. Strategi edukasi ini diimplementasikan melalui diskusi tatap muka di ruang publik gampong dan pemanfaatan media literasi fisik seperti spanduk dan selebaran secara berkelanjutan. Sementara itu, sasaran program ditentukan secara strategis dengan menasar kelompok pemuda dan ibu rumah tangga guna mengintervensi perilaku dari unit domestik, serta melibatkan aktor lokal (tokoh agama dan aparat desa) untuk mengintegrasikan nilai kearifan lokal. Dengan melibatkan kelompok pemulung sebagai aktor (pihak) yang terdampak langsung, WALHI Aceh berhasil menciptakan pola pendampingan inklusif yang mentransformasi ruang kultural menjadi basis kesadaran ekologis yang berkelanjutan.

3. Respon Masyarakat terhadap Program WALHI

Penerimaan masyarakat terhadap kampanye ekologis menjadi indikator keberhasilan komunikasi organisasi. Mengenai bagaimana respon warga setempat serta pandangan pihak pengelola sampah terhadap gerakan yang dilakukan WALHI, informan yaitu masyarakat Gampong Jawa menyatakan bahwa:

“Warga di sini umumnya merespon positif, terutama anak-anak muda. Kami merasa ada yang membela saat lingkungan kami mulai tercemar. Tapi memang ada juga sebagian warga yang acuh, terutama yang sibuk bekerja di TPA, mereka pikir kegiatan diskusi seperti itu tidak langsung menghasilkan uang, jadi mereka lebih memilih fokus pada pekerjaan mereka sehari-hari”⁴²

Informan lainnya yaitu pihak pengelola sampah di Gampong Jawa menyatakan bahwa:

“Di satu sisi, kampanye WALHI membantu meningkatkan kesadaran warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Namun di sisi lain, terkadang kampanye mereka yang sangat kritis membuat masyarakat menjadi reaktif terhadap kami di lapangan. Tapi secara keseluruhan, ini adalah kontrol sosial yang bagus untuk memotivasi kami bekerja lebih baik”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap aktivitas WALHI Aceh di Gampong Jawa menunjukkan dinamika yang kompleks antara dukungan moral dan tantangan pragmatis. Di satu sisi, kehadiran WALHI memberikan rasa aman bagi masyarakat karena dianggap sebagai pembela hak-hak lingkungan warga, yang pada gilirannya menumbuhkan sikap kritis terhadap kinerja pengelola sampah. Namun di sisi lain, kesadaran ekologis ini masih berbenturan dengan realitas ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada operasional TPA, sehingga muncul sikap acuh dari sebagian warga

⁴² Hasil wawancara peneliti bersama MR yang merupakan masyarakat desa Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

⁴³ Hasil wawancara peneliti bersama A yang merupakan pihak pengelola sampah di TPA Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

yang lebih memprioritaskan kebutuhan materiil jangka pendek. Bagi pihak pengelola, meskipun kampanye WALHI menciptakan tekanan sosial yang membuat masyarakat lebih reaktif, peran tersebut diakui secara objektif sebagai fungsi kontrol sosial yang efektif dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut.

Tujuan utama dari pembangunan kesadaran ekologis adalah terjadinya transformasi perilaku (perubahan perilaku) pada masyarakat sasaran. Mengenai indikasi perubahan tindakan (perilaku) masyarakat dalam menyikapi keberadaan TPA dan pengelolaan sampah di lingkungan Gampong Jawa, informan yaitu masyarakat Gampong Jawa menyatakan bahwa:

“Dulu kami kalau buang sampah ya langsung saja lempar ke belakang rumah atau karena pikir kami toh sudah dekat TPA. Tapi setelah sering ikut diskusi dengan teman-teman WALHI, sekarang setidaknya botol plastik dan kardus kami kumpulkan sendiri untuk dijual lagi. Ada rasa malu kalau masih buang sampah sembarangan sementara kita sudah tahu dampaknya sangat buruk bagi kita semua.”⁴⁴

Informan lainnya yaitu aparat desa di Gampong Jawa menyatakan bahwa:

“Perubahan itu mulai terlihat pada kepedulian warga saat ada tumpukan sampah di pinggir jalan gampong. Sekarang warga lebih berani menegur orang luar yang buang sampah sembarangan di wilayah kami. Walaupun belum semua warga berubah total dalam hal pemilahan sampah organik, setidaknya kesadaran untuk menjaga kebersihan

⁴⁴ Hasil wawancara peneliti bersama Y yang merupakan masyarakat desa Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

fasilitas umum di gampong sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelum ada pendampingan dari WALHI”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program yang dijalankan oleh WALHI Aceh telah berhasil menstimulasi perubahan perilaku masyarakat. Transformasi ini terlihat dari adanya pergeseran paradigma, di mana sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah yang dibuang, melainkan mulai dikelola melalui pemilahan barang bernilai ekonomi (seperti plastik dan kardus). Selain itu, munculnya perasaan 'malu' dan keberanian warga untuk melakukan kontrol sosial terhadap pihak luar yang mengotori gampong menunjukkan bahwa kesadaran ekologis telah terinternalisasi menjadi nilai sosial baru. Meskipun perubahan ini belum menyeluruh secara teknis, keberhasilan WALHI dalam menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap kebersihan lingkungan gampong menjadi indikator kuat efektivitas pendampingan yang telah dilakukan.

Dalam konteks masyarakat Aceh yang memiliki karakteristik religius yang kuat, penggunaan pendekatan agama menjadi strategi krusial bagi WALHI. Terkait bagaimana nilai-nilai keislaman diintegrasikan ke dalam pesan-pesan lingkungan, informan yaitu perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

“Kami menyadari bahwa di Aceh, metode edukasi agama jauh lebih cepat diterima daripada aturan yang formal. Maka dalam setiap materi edukasi, kami selalu menyelipkan konsep 'Fasad fil Ardh' atau larangan

⁴⁵ Hasil wawancara peneliti bersama AK yang merupakan perwakilan aparaturnya desa Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

merusak bumi dan tanggung jawab manusia sebagai 'Khalifah'. Kami sering bekerjasama dengan tokoh agama lokal untuk menyampaikan bahwa menjaga lingkungan TPA agar tidak mencemari pemukiman adalah bagian dari amal jariyah dan menjaga kesucian (Thaharah)”⁴⁶

Informan lainnya yaitu salah satu masyarakat Gampong Jawa menyatakan bahwa:

“Mereka bilang kebersihan itu sebagian dari iman, jadi kalau kita biarkan sampah menumpuk dan mencemari lingkungan, berarti kita tidak menjaga iman kita. Pendekatan seperti ini buat kami lebih mudah mengerti karena memang sesuai dengan apa yang kami pelajari di pengajian. Kami jadi merasa menjaga lingkungan ini juga ibadah, bukan cuma urusan dinas kebersihan saja.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa WALHI Aceh berhasil melakukan lokalisasi isu lingkungan melalui pendekatan dakwah ekologis yang selaras dengan identitas sosio-religius masyarakat Aceh. Strategi mengintegrasikan konsep Islam seperti Khalifah (pemimpin di bumi), Thaharah (bersuci), dan larangan berbuat kerusakan (*Fasad fil Ardh*) terbukti lebih efektif dan persuasif dibandingkan sekadar menggunakan pendekatan regulasi formal. Dengan membingkai isu pengelolaan sampah di sekitar TPA sebagai bagian dari manifestasi iman dan amal jariyah, WALHI mampu mentransformasi kewajiban menjaga lingkungan dari sekadar tugas administratif menjadi

⁴⁶ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

⁴⁷ Hasil wawancara peneliti bersama Y yang merupakan masyarakat desa Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

sebuah kewajiban teologis. Hal ini mempermudah internalisasi kesadaran masyarakat karena pesan-pesan ekologis tersebut beresonansi langsung dengan nilai-nilai yang mereka pelajari dalam ruang-ruang pengajian harian.

Keberadaan TPA Gampong Jawa tidak hanya memberikan dampak ekologis, tetapi juga berimplikasi pada kondisi sosial dan kesehatan warga di sekitarnya. Mengenai sejauh mana WALHI mengambil peran dalam melakukan pendampingan terhadap warga yang terdampak langsung, informan yaitu masyarakat Gampong Jawa menyatakan bahwa:

“WALHI sangat berperan ketika kami mengeluh masalah kesehatan, seperti gatal-gatal atau bau menyengat yang sudah tidak tertahankan. Mereka tidak hanya mendengar, tapi mendampingi kami untuk melapor dan melakukan mediasi dengan pihak pemerintah kota. Jadi, kami tidak merasa berjuang sendirian menghadapi dampak kesehatan dari tumpukan sampah itu”⁴⁸

Informan lainnya yaitu pihak pengelola sampah di Gampong Jawa menyatakan bahwa:

“Peran WALHI dalam pendampingan ini sering kali menjadi 'alarm' bagi kami. Mereka sering membawa keluhan warga secara langsung ke kantor kami terkait masalah sosial atau kesehatan. Meskipun kadang diskusi dengan mereka berlangsung cukup alot karena tuntutan warga yang tinggi, kami mengakui bahwa pendampingan yang mereka lakukan membantu kami memetakan area

⁴⁸ Hasil wawancara peneliti bersama MR yang merupakan masyarakat desa Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

mana yang paling terdampak secara sosial sehingga kami bisa segera melakukan langkah teknis mitigasi.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa WALHI Aceh menjalankan peran strategis sebagai fasilitator dan advokat bagi masyarakat yang terdampak secara langsung oleh operasional TPA Gampong Jawa. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya berhenti pada tahap penampungan keluhan, tetapi berlanjut hingga proses mediasi dan pelaporan kepada otoritas terkait, sehingga memberikan rasa aman dan dukungan psikososial bagi warga. Bagi pihak pengelola sampah, eksistensi WALHI berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial atau 'alarm' yang membantu mereka mengidentifikasi titik-titik krusial yang memerlukan mitigasi teknis segera. Dengan demikian, peran pendampingan WALHI telah menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat dengan tanggung jawab manajerial pemerintah, yang pada akhirnya meminimalisir potensi konflik sosial di wilayah tersebut.

Sebagai bentuk evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, efektivitas peran WALHI diukur melalui perspektif penerima manfaat dan mitra kerja di lapangan. Terkait tingkat keberhasilan WALHI dalam menumbuhkan kesadaran ekologis di Gampong Jawa, informan yaitu masyarakat Gampong Jawa menyatakan bahwa:

⁴⁹ Hasil wawancara peneliti bersama A yang merupakan pihak pengelola sampah di TPA Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

“Menurut saya sudah cukup efektif, terutama dalam mengubah cara pandang kami. Dulu kami acuh tak acuh, tapi sekarang kami sadar bahwa lingkungan Gampong Jawa ini tanggung jawab bersama, bukan cuma tanggung jawab orang kebersihan. Walaupun belum semua orang di sini berubah perilakunya, tapi bibit-bibit kepedulian itu sudah ditanam oleh WALHI dengan sangat baik”⁵⁰

Informan lainnya yaitu pihak pengelola sampah di Gampong Jawa menyatakan bahwa:

“indikatornya adalah membangun wacana dan kesadaran kritis, kami rasa peran WALHI sangat efektif. Masyarakat sekarang lebih peka terhadap isu lingkungan di TPA. Namun, jika bicara efektivitas secara teknis di lapangan, tentu WALHI punya keterbatasan karena mereka bukan eksekutor kebijakan. Secara keseluruhan, mereka berhasil menjadi motor penggerak kesadaran masyarakat di sana”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran WALHI Aceh dalam membangun kesadaran ekologis di Gampong Jawa dinilai berhasil pada level transformasi paradigma dan pembangunan kesadaran kritis masyarakat. Keberhasilan ini terlihat dari adanya pergeseran cara pandang warga yang kini memandang kelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab kolektif, bukan lagi kewajiban sepihak pemerintah. Meskipun perubahan perilaku teknis di lapangan masih menghadapi tantangan dan keterbatasan-mengingat WALHI

⁵⁰ Hasil wawancara peneliti bersama MR yang merupakan masyarakat desa Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

⁵¹ Hasil wawancara peneliti bersama CR yang merupakan pihak pengelola sampah di TPA Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

bukan merupakan lembaga eksekutif pemegang kebijakan-posisi mereka sebagai 'motor penggerak' telah berhasil menanamkan nilai-nilai kepedulian lingkungan yang kuat. Secara keseluruhan, WALHI telah menjalankan fungsinya secara efektif sebagai stimulator kesadaran yang mengubah masyarakat dari sikap apatis menjadi lebih peka dan kritis terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar TPA.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap penerapan program WALHI Aceh yaitu menunjukkan hal yang positif. di mana terjadi transformasi (perubahan) cara pandang dari sikap apatis menjadi lebih kritis dan peka terhadap kualitas lingkungan. Efektivitas program ini didorong oleh strategi lokalisasi isu melalui pendekatan dakwah ekologis yang mengintegrasikan nilai-nilai teologis Islam, sehingga kewajiban menjaga lingkungan terinternalisasi sebagai manifestasi iman. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti realitas ekonomi warga di sekitar TPA, WALHI Aceh berhasil menumbuhkan rasa kepemilikan dan keberanian melakukan kontrol sosial dalam masyarakat. Sebagai fasilitator dan advokat, peran WALHI terbukti efektif menciptakan keseimbangan antara hak kesehatan masyarakat dan tanggung jawab manajerial pemerintah, yang pada akhirnya meminimalisir potensi konflik sosial melalui penguatan kesadaran kolektif.

C. Hambatan yang Dihadapi oleh WALHI dalam Membangun Kesadaran Ekologis Masyarakat di Gampong Jawa Kota Banda Aceh

Membangun kesadaran ekologis di wilayah yang bersentuhan langsung dengan pusat pembuangan sampah kota bukanlah pekerjaan yang mudah. Meskipun berbagai program telah diinisiasi oleh WALHI Aceh, namun dalam implementasinya terdapat berbagai tantangan kompleks yang menghambat percepatan transformasi perilaku masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya muncul dari faktor internal organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersifat struktural, ekonomi, maupun budaya lokal.

Di satu sisi, masyarakat Gampong Jawa dihadapkan pada ketergantungan ekonomi terhadap keberadaan TPA, sementara di sisi lain mereka adalah pihak yang paling rentan terpapar dampak negatifnya. Kondisi dilematis ini sering kali menciptakan resistensi atau sikap skeptis terhadap pesan-pesan lingkungan yang dibawa oleh aktivis. Selain itu, sinkronisasi antara gerakan masyarakat sipil dengan kebijakan teknis pemerintah juga kerap menemui jalan terjal yang membatasi ruang gerak WALHI dalam mewujudkan perubahan yang sistemis.

Untuk memetakan secara mendalam kendala-kendala tersebut, peneliti telah menggali informasi dari para informan mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penghalang utama dalam proses edukasi lingkungan di Gampong Jawa. Analisis

berikut akan menguraikan hambatan-hambatan tersebut secara mendetail berdasarkan temuan di lapangan.

1. Kendala Internal dan Eksternal WALHI dalam Pelaksanaan Program

Dalam mengimplementasikan program-programnya, WALHI Aceh menghadapi berbagai tantangan dari berbagai aspek dan situasi. Berikut merupakan kendala utama yang dihadapi oleh WALHI dalam menjalankan program kesadaran ekologis di Gampong Jawab. Informan yaitu perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

“Kendala terbesar kami adalah membenturkan isu lingkungan dengan isu ekonomi. Sebagian masyarakat Gampong Jawa bergantung hidup sebagai pemulung di TPA. Ketika kami bicara soal pengurangan sampah atau penutupan zona tertentu yang mencemari, mereka merasa mata pencahariannya terancam. Selain itu, keterbatasan personel kami untuk melakukan pendampingan secara intensif setiap hari membuat pesan-pesan ekologis kadang terputus dan tidak menjadi kebiasaan yang permanen di tengah warga.”⁵²

Berikutnya, informan lainnya yaitu aparaturnya di Gampong Jawa menyatakan bahwa:

“Hambatan yang paling terasa adalah kurangnya dukungan fasilitas setelah masyarakat diberikan pemahaman. WALHI sudah ajari warga cara pilah sampah organik dan plastik, tapi di gampong kita tidak tersedia tong sampah pilah yang memadai dari pemerintah. Akhirnya, warga yang sudah punya niat baik jadi kecewa

⁵² Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

karena sampah yang sudah dipilah di rumah, ujung-ujungnya dicampur lagi oleh truk pengangkut sampah. Ini membuat edukasi dari WALHI seolah-olah sia-sia di mata warga.”⁵³

Berikutnya, informan lainnya yaitu pihak pengelola sampah dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

“Dari sisi pengelola, kendalanya adalah adanya benturan antara standar teknis operasional TPA dengan ekspektasi tinggi yang dibangun WALHI di masyarakat. Kadang-kadang, informasi yang sampai ke warga membuat mereka menuntut perubahan yang instan, padahal kami memiliki keterbatasan anggaran dan prosedur birokrasi yang panjang. Komunikasi yang belum satu frekuensi antara aktivis, warga, dan dinas terkait inilah yang sering kali menghambat efektivitas program di lapangan.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi WALHI Aceh dalam membangun kesadaran ekologis di Gampong Jawa bersifat sistemik dan melibatkan benturan kepentingan antara aspek ekonomi, infrastruktur, dan birokrasi. Kendala utama muncul dari adanya dilema antara kelestarian lingkungan dengan ketahanan ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas pemulungan, sehingga memicu resistensi terhadap upaya pengurangan sampah. Selain itu, terjadi ketidaksinkronan antara edukasi yang diberikan dengan ketersediaan fasilitas penunjang dari pemerintah, yang

⁵³ Hasil wawancara peneliti bersama AK yang merupakan perwakilan aparaturnya desa Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

⁵⁴ Hasil wawancara peneliti bersama CR yang merupakan pihak pengelola sampah di TPA Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

menyebabkan motivasi masyarakat menurun akibat ketiadaan sistem pengelolaan sampah terpadu. Ketidakpahaman serta perbedaan perspektif antara standar operasional pengelola TPA dengan ekspektasi masyarakat yang telah tereduksi juga menciptakan jarak komunikasi, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aktivis, warga, dan pemerintah agar program kesadaran ekologis tidak terhambat oleh kendala teknis dan administratif.

Kondisi sosio geografis Gampong Jawa yang berdampingan dengan TPA menciptakan simbiosis ekonomi yang kompleks. Bagi sebagian besar warga, TPA bukan sekadar tempat pembuangan limbah, melainkan sumber utama penghidupan. Ketergantungan ekonomi ini menjadi salah satu hambatan paling signifikan dalam menumbuhkan kesadaran ekologis. Informan yaitu perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

“Ketergantungan ekonomi ini adalah 'tembok' yang paling sulit ditembus. Sulit mengajak warga bicara soal bahaya limbah atau sampah jika mereka setiap hari harus masuk ke area TPA untuk memulung demi menyambung hidup. Ada kekhawatiran di kalangan mereka bahwa jika WALHI terlalu keras memprotes pemerintah, TPA akan ditutup atau direlokasi, yang artinya mereka kehilangan pekerjaan. Jadi, kami harus menggunakan pendekatan yang sangat manusiawi agar mereka paham bahwa kami ingin TPA ini dikelola dengan benar, bukan menutup sumber rezeki mereka.”⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

Informan lainnya, yaitu pihak pengelola sampah dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

*“Realitas sosial di lapangan memang seperti itu. Para pemulung dan sebagian warga sekitar sudah menganggap TPA sebagai tumpuan ekonomi. Hambatannya adalah ketika ada kebijakan teknis untuk perbaikan lingkungan TPA, terkadang berbenturan dengan aktivitas memulung warga. Mereka sering kali mengabaikan prosedur keselamatan kerja atau kesehatan lingkungan karena desakan ekonomi. Inilah yang membuat program-program penyadaran dari WALHI atau dari kami sendiri sering menemui jalan buntu karena faktor 'perut' selalu menjadi prioritas utama mereka.”*⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa ketergantungan ekonomi masyarakat Gampong Jawa terhadap TPA menjadi hambatan struktural yang menciptakan dilema antara keberlangsungan hidup dan kesadaran ekologis. Realitas sosiogeografis yang menempatkan TPA sebagai sumber pendapatan utama menyebabkan masyarakat cenderung memprioritaskan kepentingan ekonomi jangka pendek di atas isu kesehatan dan keselamatan lingkungan. Kekhawatiran warga akan potensi kehilangan lapangan kerja akibat aktivitas advokasi lingkungan memaksa WALHI untuk menerapkan strategi pendekatan yang lebih humanis, guna menyakinkan masyarakat bahwa perbaikan tata kelola lingkungan tidak berarti penghapusan mata pencaharian mereka. Dengan demikian, hambatan ini

⁵⁶ Hasil wawancara peneliti bersama CR yang merupakan pihak pengelola sampah di TPA Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap standar lingkungan bukan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan semata, melainkan oleh desakan kebutuhan hidup yang memaksa warga mengabaikan risiko ekologis demi menjaga stabilitas ekonomi keluarga.

Berikutnya, sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bersifat independen, ketersediaan sumber daya merupakan faktor penentu keberlanjutan sebuah program pendampingan. WALHI Aceh tidak lepas dari tantangan internal terkait kapasitas organisasi dalam mengawal isu TPA Gampong Jawa secara jangka panjang. Terkait hal tersebut, perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

“Kami tidak memungkiri bahwa keterbatasan dana dan SDM adalah kendala klasik namun nyata. Sebagai LSM, anggaran kami sangat terbatas untuk mencakup seluruh wilayah pendampingan secara intensif. Kami hanya memiliki beberapa staf yang harus menangani banyak isu lingkungan sekaligus di seluruh Aceh, sehingga fokus di Gampong Jawa terkadang harus terbagi. Hal ini berdampak pada ritme edukasi ke warga yang tidak bisa dilakukan setiap hari. Kami sangat bergantung pada relawan dan semangat masyarakat untuk menjaga agar program kesadaran ekologis ini tetap hidup meskipun pendanaan kami sangat terbatas.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan kesadaran ekologis di Gampong Jawa sangat dipengaruhi oleh stabilitas sumber daya internal organisasi yang saat ini masih memiliki keterbatasan.

⁵⁷ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

Kendala finansial dan minimnya jumlah anggota tetap menyebabkan intensitas pendampingan menjadi tidak merata, mengingat WALHI Aceh harus mengelola cakupan isu lingkungan yang luas di berbagai wilayah lainnya. Kondisi ini menciptakan tantangan dalam menjaga ritme edukasi agar tetap konsisten dan berkelanjutan di tingkat tapak. Oleh karena itu, strategi organisasi dalam memanfaatkan jaringan relawan dan modal sosial masyarakat lokal menjadi kunci utama agar gerakan kesadaran ini tetap berjalan, sekaligus menunjukkan bahwa partisipasi aktif warga merupakan substitusi krusial di tengah keterbatasan sumber daya formal organisasi.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kendala internal yang dihadapi oleh WALHI Aceh dalam pelaksanaan program kerja adalah keterbatasan finansial dan sumber daya manusia organisasi menyebabkan intensitas pendampingan menjadi kurang konsisten. Kondisi ini menuntut adanya strategi penguatan modal sosial melalui jaringan relawan dan sinergi lintas sektor agar keberlanjutan program kesadaran ekologis tidak terhenti pada hambatan teknis dan administratif. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi oleh WALHI Aceh dalam pelaksanaan program kerja adalah berupa dilema struktural antara kepentingan ekonomi jangka pendek masyarakat yang bergantung pada TPA dengan kebutuhan pelestarian lingkungan jangka panjang, serta minimnya dukungan infrastruktur dari pemerintah yang menurunkan motivasi warga.

2. Hambatan Budaya dalam Perubahan Perilaku

Selain faktor ekonomi, tantangan terbesar dalam perubahan perilaku terletak pada kebiasaan (budaya) yang telah mengakar selama puluhan tahun. Di Gampong Jawa, lokasi pemukiman yang sangat dekat dengan TPA menciptakan budaya pengelolaan sampah yang cenderung terbaikan karena menganggap sampah adalah bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan mereka. Informan perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

“Ada hambatan budaya berupa perilaku 'instan' (sembarangan) dalam membuang sampah. Karena mereka tinggal di area TPA, muncul persepsi bahwa 'seluruh wilayah ini adalah tempat sampah', sehingga membuang sampah ke belakang rumah atau ke selokan dianggap hal lumrah. Kebiasaan tidak memilah ini sudah turun-temurun. Mengubah pola pikir agar warga mau bersusah payah memilah sampah di dalam rumah mereka sendiri adalah tantangan budaya yang paling berat, karena mereka merasa hal itu menambah beban pekerjaan rumah tangga”⁵⁸

Informan lainnya, yaitu pihak pengelola sampah dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

“Hambatan kebiasaan yang kami lihat adalah ketergantungan masyarakat pada petugas atau alam untuk 'melenyapkan' sampah. Budaya membakar sampah plastik atau membuangnya ke genangan air lindi masih sering ditemukan. Mereka berpikir bahwa karena mereka berada di ring satu TPA, maka sampah mereka akan hilang dengan sendirinya terbawa alat berat kami. Mengubah kebiasaan

⁵⁸ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

dari 'membuang' menjadi 'mengelola' itu memerlukan waktu yang sangat lama.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hambatan budaya berupa normalisasi pencemaran yang telah terinternalisasi dalam keseharian masyarakat Gampong Jawa akibat kedekatan geografis yang ekstrem dengan TPA. Persepsi yang menganggap lingkungan pemukiman sebagai bagian dari hamparan tempat pembuangan menciptakan perilaku pengelolaan sampah yang permisif terhadap tindakan membuang sampah sembarangan maupun membakar sampah. Selain itu, adanya ketergantungan psikologis terhadap petugas kebersihan dan alat berat di TPA memicu sikap abai warga dalam mengelola sampah dari level rumah tangga. Transformasi dari budaya 'membuang' menjadi 'mengelola' bukan sekadar menghadapi kendala teknis, melainkan harus membongkar kebiasaan turun-temurun yang memandang pemilahan sampah sebagai beban tambahan, sehingga diperlukan pendekatan edukasi yang jauh lebih intensif untuk mendekonstruksi pola pikir instan tersebut.

Selanjutnya, faktor pendidikan juga sering kali dianggap sebagai fondasi utama dalam penyerapan informasi. Dalam program edukasi ekologis yang dilakukan oleh WALHI, tingkat pendidikan formal masyarakat menjadi salah satu variabel yang memengaruhi kecepatan dan kedalaman pemahaman warga

⁵⁹ Hasil wawancara peneliti bersama CR yang merupakan pihak pengelola sampah di TPA Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

terhadap materi yang disampaikan. Informan yaitu perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

“Kami melihat bahwa pendidikan formal bukan penentu tunggal. Justru masyarakat dengan pendidikan rendah lebih cepat paham jika edukasinya menggunakan bahasa aksi dan contoh nyata, seperti menunjukkan langsung air sumur yang tercemar. Jadi, pendidikan memengaruhi kecepatan serap informasi, tetapi metode pendekatan kami yang harus menyesuaikan agar tetap efektif.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan formal masyarakat Gampong Jawa tidak menjadi hambatan yang rumit bagi efektivitas program kesadaran ekologis, melainkan menjadi sebuah variabel yang menentukan pemilihan metode komunikasi yang digunakan oleh WALHI. Meskipun latar belakang pendidikan memengaruhi kecepatan dalam menyerap informasi yang bersifat teoretis, pemahaman substantif warga lebih mudah terbentuk melalui pendekatan edukasi berbasis visual di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan internalisasi nilai-nilai ekologis lebih bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengemas pesan ke dalam bahasa aksi yang relevan dengan realitas harian warga, daripada sekadar mengandalkan literasi formal. Dengan demikian, adaptasi metode komunikasi menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan latar belakang pendidikan guna mencapai kesadaran kolektif.

⁶⁰ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

Setiap upaya perubahan sosial tidak jarang menemui hambatan berupa penolakan dari kelompok sasaran. Dalam konteks di TPA Gampong Jawa, resistensi yang muncul umumnya bukan merupakan penolakan terhadap sosok organisasi WALHI, melainkan kekhawatiran akan terganggunya stabilitas ekonomi warga. Informan yaitu aparatur desa di Gampong Jawa menyatakan bahwa:

“Kalau penolakan secara terang-terangan atau aksi demo menolak WALHI itu tidak ada. Tapi bentuk resistensinya lebih ke sikap tidak peduli atau 'cuek'. Misalnya, saat ada undangan diskusi lingkungan, sebagian warga enggan hadir karena mereka merasa waktu mereka lebih berharga untuk memulung atau bekerja di TPA daripada duduk mendengar sosialisasi. Ada semacam rasa takut kalau isu lingkungan ini terlalu dibesar-besarkan, nanti TPA ditutup dan mereka kehilangan pekerjaan.”⁶¹

Informan lainnya, yaitu perwakilan WALHI dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

“Resistensi yang kami temui biasanya berupa prasangka. Di awal masuk, ada warga yang mengira kami datang untuk mencari kesalahan mereka atau ingin membatasi aktivitas ekonomi mereka di TPA. Bentuk penolakannya halus, seperti tidak menjalankan hasil kesepakatan pemilahan sampah di rumah masing-masing dengan alasan merepotkan. Kami harus berulang kali menjelaskan bahwa kehadiran kami adalah untuk melindungi kesehatan mereka dalam jangka panjang, bukan untuk memutus rezeki mereka.”⁶²

⁶¹ Hasil wawancara peneliti bersama AK yang merupakan perwakilan aparatur desa Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

⁶² Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

Informan lainnya, yaitu perwakilan WALHI dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

“Resistensi yang kami temui biasanya berupa prasangka. Di awal masuk, ada warga yang mengira kami datang untuk mencari kesalahan mereka atau ingin membatasi aktivitas ekonomi mereka di TPA. Bentuk penolakannya halus, seperti tidak menjalankan hasil kesepakatan pemilahan sampah di rumah masing-masing dengan alasan merepotkan. Kami harus berulang kali menjelaskan bahwa kehadiran kami adalah untuk melindungi kesehatan mereka dalam jangka panjang, bukan untuk memutus rezeki mereka.”

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa resistensi masyarakat di Gampong Jawa terhadap program WALHI Aceh tidak dalam bentuk penolakan fisik atau konfrontasi terbuka, melainkan dalam bentuk resistensi pasif yang dipicu oleh kekhawatiran pragmatis-ekonomis. Sikap apatis atau ketidakpedulian sebagian warga saat diajak berpartisipasi merupakan cerminan dari kecemasan akan hilangnya mata pencaharian jika isu lingkungan dianggap dapat mengancam keberadaan operasional TPA. Selain itu, adanya prasangka awal serta keengganan mengubah kebiasaan domestik menunjukkan bahwa tantangan terbesar WALHI adalah memediasi ketegangan antara kepentingan kesehatan jangka panjang dengan stabilitas ekonomi harian warga. Dengan demikian, penolakan halus ini lebih merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri masyarakat terhadap perubahan yang dianggap berisiko terhadap kelangsungan rezeki mereka.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hambatan budaya dalam perubahan perilaku masyarakat adalah bermula atau berakar pada normalisasi pencemaran akibat kedekatan geografis dengan TPA, yang memicu perilaku pengelolaan sampah yang permisif dan ketergantungan psikologis pada infrastruktur pembersihan otomatis. Tantangan ini diperkuat oleh resistensi pasif masyarakat yang muncul dari kekhawatiran secara ekonomis terhadap kelangsungan mata pencaharian, serta adanya pola pikir turun-temurun yang memandang pemilahan sampah sebagai beban domestik. Selain itu, efektivitas transformasi budaya dari “membuang” menjadi “mengelola” sangat bergantung pada dekonstruksi metode komunikasi; di mana organisasi harus mampu merubah sekedar teori menjadi bahasa aksi berbasis visual guna menjembatani keberagaman latar belakang pendidikan dan mencapai kesadaran ekologis kolektif.

3. Dukungan Pemerintah Daerah

Hubungan antara organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah daerah sering kali bersifat dinamis, terutama dalam isu pengelolaan sampah yang melibatkan kepentingan publik dan kebijakan teknis. Mengenai sejauh mana dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap inisiatif lingkungan yang dilakukan oleh WALHII, informan yaitu perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

“Dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, kami lihat masih bersifat fluktuatif. Di satu sisi, mereka terbuka untuk berdialog dan terkadang

memfasilitasi kami dalam pertemuan-pertemuan formal. Namun, dalam hal dukungan kebijakan yang konkret, seperti penyediaan infrastruktur pemilahan sampah yang memadai di tingkat desa untuk mendukung program edukasi kami, itu masih sangat minim. Sering kali posisi kami dianggap sebagai pengkritik, sehingga dukungan yang diberikan lebih banyak bersifat administratif daripada dukungan operasional yang menyentuh akar masalah di TPA.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa hubungan kemitraan antara WALHI Aceh dan pemerintah daerah masih terjebak dalam tataran administratif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek kolaborasi operasional yang substantif. Meskipun saluran komunikasi formal telah terbuka melalui ruang dialog, dukungan tersebut belum menjelma dalam bentuk kebijakan konkret maupun penyediaan infrastruktur yang selaras dengan program edukasi di lapangan. Posisi WALHI yang sering kali berseberangan sebagai pengontrol kebijakan (*check and balances*) tampaknya menjadi hambatan bagi pemerintah untuk memberikan dukungan teknis yang lebih luas. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kesadaran masyarakat yang telah dibangun oleh WALHI dengan ketersediaan fasilitas publik, yang pada akhirnya membatasi efektivitas penanganan masalah lingkungan di TPA Gampong Jawa secara terpadu.

Gerakan advokasi lingkungan sering kali bersinggungan dengan kepentingan politik dan kebijakan pemerintah daerah.

⁶³ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

Sebagai lembaga yang kritis, WALHI Aceh kerap berada dalam posisi yang dilematis ketika harus menyuarakan hak-hak ekologis warga di tengah agenda pembangunan kota. Terkait adanya tekanan atau pengaruh kepentingan tertentu, perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

“Tekanan politik secara langsung seperti intimidasi fisik mungkin tidak ada, namun tantangannya lebih kepada upaya 'pembatasan ruang' dalam kebijakan. Sering kali narasi kami dianggap menghambat program pemerintah atau dicap sebagai gerakan yang hanya bisa mengkritik tanpa solusi. Kepentingan politik dalam anggaran pengelolaan sampah juga sering kali membuat rekomendasi kami tidak menjadi prioritas. Kami harus sangat berhati-hati agar gerakan murni masyarakat ini tidak ditunggangi oleh kepentingan politik praktis, terutama menjelang momen pemilihan daerah.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa hambatan politik yang dihadapi WALHI Aceh dalam menjalankan fungsinya tidak mewujudkan dalam bentuk represi fisik, melainkan dalam bentuk marginalisasi peran dan pembatasan ruang dalam pengambilan kebijakan. Adanya stigma negatif dari pemerintah daerah yang memandang gerakan advokasi sebagai hambatan pembangunan menyebabkan rekomendasi-rekomendasi ekologis sering kali dikesampingkan dalam prioritas anggaran publik. Selain itu, kompleksitas kepentingan politik praktis menuntut WALHI untuk bekerja secara ekstra hati-hati guna

⁶⁴ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

menjaga independensi gerakan masyarakat agar tidak terkooptasi oleh agenda politik tertentu. Dengan demikian, tantangan eksternal ini menunjukkan bahwa perjuangan kesadaran ekologis di Gampong Jawa tidak hanya berhadapan dengan masalah sampah secara teknis, tetapi juga harus bersinggungan dengan dinamika relasi kuasa yang memengaruhi arah kebijakan lingkungan hidup.

Media massa memiliki fungsi sebagai penyambung lidah sekaligus pembentuk opini publik. Dalam kampanye isu TPA Gampong Jawa, media lokal di Aceh menjadi instrumen penting bagi WALHI untuk memperluas jangkauan pesan di luar batas geografis gampong tersebut. Informan yaitu perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

*“Media lokal di Aceh umumnya sangat mendukung. Setiap kali kami merilis data tentang tingkat pencemaran atau keluhan warga Gampong Jawa, rekan-rekan jurnalis langsung mengangkatnya menjadi berita utama. Ini sangat membantu menekan pemerintah agar lebih responsif. Namun, hambatannya adalah durasi isu. Media cenderung hanya tertarik pada isu yang sedang hangat atau saat terjadi konflik saja. Saat kami melakukan program edukasi yang sifatnya rutin dan pelan, media jarang meliput karena dianggap kurang memiliki nilai berita (news value). Jadi media adalah pendukung kuat untuk advokasi, tapi kurang berperan dalam mendukung edukasi harian yang bersifat jangka panjang.”*⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa media lokal di Aceh memiliki peran strategis sebagai

⁶⁵ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

amplifikator isu yang efektif dalam mendukung fungsi advokasi WALHI, namun memiliki keterbatasan dalam mengawal proses edukasi yang bersifat jangka panjang. Kehadiran media mampu menciptakan tekanan publik yang memaksa pemerintah untuk lebih responsif terhadap isu-isu pencemaran yang bersifat krusial atau konflikual. Namun, ketergantungan media pada nilai berita (news value) yang mengutamakan sensasi atau peristiwa besar menyebabkan program-program pemberdayaan dan edukasi rutin yang bersifat perlahan kurang mendapatkan ruang pemberitaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa media massa lebih berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam strategi advokasi kebijakan daripada sebagai mitra dalam proses transformasi perilaku masyarakat yang membutuhkan konsistensi informasi secara terus-menerus.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap upaya WALHI Aceh masih terbatas pada pemenuhan aspek administratif dan belum mencapai tahap kolaborasi operasional yang strategis. Hal ini terlihat dari minimnya kebijakan konkret serta ketiadaan sinkronisasi infrastruktur publik dengan program edukasi lingkungan yang dijalankan. Hambatan politik berupa stigma negatif terhadap gerakan advokasi mengakibatkan terjadinya marginalisasi peran WALHI dalam pengambilan keputusan dan pengalokasian anggaran publik. Akibatnya, efektivitas penanganan isu lingkungan di TPA Gampong Jawa terhambat oleh kesenjangan

antara penguatan kesadaran kritis masyarakat dengan lemahnya responsivitas manajerial pemerintah daerah.

4. Pemahaman Masyarakat serta Tokoh Masyarakat atas Kesadaran Ekologis

Efektivitas sebuah program edukasi dapat diukur melalui perbandingan tingkat pemahaman subjek (masyarakat) sebelum dan sesudah edukasi atau program kerja dilakukan. Mengenai pergeseran pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait isu ekologis di sekitar TPA. Informan yaitu perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

“Dulu, tingkat pemahaman warga sangat terbatas pada 'sampah harus dibuang'. Mereka tidak mengerti soal dampak lindi terhadap air tanah atau bahaya gas metana yang bisa memicu kebakaran di TPA. Setelah intervensi melalui diskusi rutin, sekarang masyarakat mulai paham hak mereka atas lingkungan bersih. Mereka sudah tahu bahwa air sumur yang kuning itu adalah indikasi pencemaran, dan mereka mulai mengerti bagaimana cara mengomunikasikan hal itu kepada pihak terkait.”⁶⁶

Informan lainnya, yaitu perwakilan masyarakat Gampong Jawa dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

“Sebelum kawan-kawan WALHI sering kemari, kami menganggap bau dan air kotor itu ya memang risiko tinggal dekat TPA, diterima saja sebagai nasib. Kami tidak tahu kalau ada aturannya bahwa TPA tidak boleh merusak lingkungan pemukiman. Sekarang kami jadi lebih mengerti, oh ternyata ini bahaya buat kesehatan anak-cucu nanti. Kami mulai paham cara memisahkan sampah plastik

⁶⁶ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

yang bisa dijual kembali, jadi pengetahuan kami sekarang lebih luas, bukan sekadar buang sampah saja.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa program kerja yang dilakukan oleh WALHI Aceh telah berhasil mendorong transformasi masyarakat Gampong Jawa dari tahap tidak peduli (apatis) ekologis menuju kesadaran kritis. Sebelum adanya pendampingan, masyarakat cenderung melakukan normalisasi terhadap pencemaran lingkungan seperti bau menyengat dan kualitas air yang buruk, sebagai konsekuensi geografis yang tidak terelakkan. Namun, pasca intervensi, terjadi pergeseran pemahaman di mana warga mulai mengenali indikator pencemaran secara saintifik sederhana (seperti dampak lindi dan gas metana) serta memahami hak-hak hukum mereka atas lingkungan yang sehat. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis mengenai pemilahan sampah bernilai ekonomi, tetapi juga menumbuhkan keberanian warga untuk melakukan advokasi terhadap kualitas hidup dan kesehatan generasi mendatang.

Selanjutnya, dalam struktur sosial masyarakat Aceh, tokoh agama (Teungku) dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam menentukan diterima atau tidaknya sebuah gagasan baru. Keberhasilan WALHI dalam membangun kesadaran ekologis sangat bergantung pada bagaimana para pemegang

⁶⁷ Hasil wawancara peneliti bersama MR yang merupakan masyarakat desa Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

otoritas sosial ini memberikan dukungan atau justru menjadi penghambat Informan yaitu perwakilan WALHI menyatakan bahwa:

“Tokoh agama di Gampong Jawa menjadi kunci keberhasilan kami. Saat kami menyelipkan pesan lingkungan dalam pengajian melalui para Teungku, warga jauh lebih cepat mendengar. Namun, hambatannya adalah jika ada tokoh masyarakat yang merasa kepentingannya terganggu, misalnya yang memiliki keterikatan bisnis dengan operasional TPA. Mereka bisa saja memberikan pengaruh agar warga tidak terlalu vokal. Jadi, peran tokoh lokal ini bisa menjadi pemicu bagi program kami, tergantung bagaimana komunikasi personal yang kami bangun dengan mereka.”⁶⁸

Informan lainnya, yaitu aparatur desa Gampong Jawa dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

“Kami para aparatur desa dan tokoh pemuda di sini sangat mendukung, karena kami yang merasakan langsung dampak bau dan lalat. Kami membantu WALHI memfasilitasi tempat di balai desa. Tapi memang ada juga tokoh-tokoh senior yang merasa cara WALHI terlalu kritis ke pemerintah. Mereka khawatir hubungan desa dengan pemerintah jadi renggang. Jadi dukungannya ada, tapi tetap dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan konflik politik desa.”⁶⁹

Informan lainnya, yaitu masyarakat di Gampong Jawa dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

⁶⁸ Hasil wawancara peneliti bersama MF yang merupakan perwakilan WALHI Aceh pada tanggal 5 Maret 2026.

⁶⁹ Hasil wawancara peneliti bersama AK yang merupakan perwakilan aparatur desa Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

“Kalau Teungku sudah bilang di balai pengajian bahwa menjaga kebersihan itu ibadah, kami jadi lebih semangat. Bagi kami, kata-kata tokoh agama itu lebih masuk ke hati. Sejauh ini tokoh-tokoh di sini mendukung, asalkan kegiatan WALHI tidak mengganggu ketertiban umum di gampong.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi tokoh agama dan tokoh masyarakat di Gampong Jawa memegang peranan sentral sebagai legitimator budaya yang dapat mempercepat atau justru menghambat penetrasi program kesadaran ekologis. Internalisasi nilai-nilai lingkungan menjadi jauh lebih efektif ketika disampaikan melalui narasi keagamaan oleh para Teungku, karena masyarakat Aceh memiliki kepatuhan spiritual yang tinggi terhadap figur ulama. Namun, di sisi lain, dukungan dari tokoh formal maupun informal di desa bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis, seperti keharmonisan hubungan politik dengan pemerintah daerah serta stabilitas ekonomi lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan WALHI dalam melakukan perubahan perilaku sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam melakukan diplomasi personal dengan para pemegang otoritas sosial, guna memastikan bahwa gerakan ekologis ini selaras dengan nilai-nilai lokal dan tidak dianggap sebagai ancaman bagi tatanan sosial yang telah ada.

⁷⁰ Hasil wawancara peneliti bersama Z yang merupakan masyarakat desa Gampong Jawa pada tanggal 6 Maret 2026.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa program kerja yang dilakukan oleh WALHI Aceh berhasil menstimulasi transformasi pemahaman masyarakat Gampong Jawa dari normalisasi pencemaran menuju penguatan kesadaran kritis yang berbasis pada literasi hak ekologis dan pengetahuan saintifik sederhana. Perubahan perilaku ini diikuti dengan peningkatan keberanian warga dalam melakukan advokasi kualitas hidup. Sementara itu, peran tokoh masyarakat dan agama sangat berperan penting sebagai legitimator budaya; di mana internalisasi nilai-nilai lingkungan menjadi lebih akseleratif saat diintegrasikan dengan narasi keagamaan dan nilai lokal. Namun, efektivitas peran tokoh tersebut tetap dipengaruhi oleh dinamika pragmatisme ekonomi dan relasi kuasa lokal, sehingga keberhasilan gerakan ekologis sangat bergantung pada diplomasi personal guna memastikan stabilitas tatanan sosial tetap terjaga.

D. Analisis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dianalisis bahwa keterlibatan WALHI Aceh dalam membangun kesadaran ekologis di Gampong Jawa merupakan sebuah upaya sistematis untuk mentransformasi (merubah) masyarakat dari sekadar objek terdampak menjadi subjek yang kritis dan berdaya. Dalam pandangan teori kesadaran kolektif Emile Durkheim, masyarakat merupakan satu kesatuan yang diikat oleh nilai, norma, dan kepercayaan bersama yang berfungsi sebagai perekat sosial. Di Gampong Jawa, kesadaran kolektif yang

lama cenderung bersifat mekanik, di mana masyarakat menerima kondisi pencemaran lingkungan seperti bau dan air tanah yang rusak sebagai sebuah "nasib" atau konsekuensi geografis yang tidak terelakkan demi menjaga stabilitas ekonomi mereka di TPA.

WALHI mencoba untuk merubah kurangnya kesadaran masyarakat tersebut melalui pendekatan partisipatif yang inklusif di Gampong Jawa, yakni dengan memanfaatkan ruang-ruang kultural seperti warung kopi dan forum warga untuk menyisipkan literasi ekologis. Secara teknis, literasi ekologis yang disisipkan dalam ruang santai ini bertujuan untuk menciptakan dialog dua arah. WALHI tidak datang dengan membawa tumpukan teori lingkungan yang rumit, melainkan memulai diskusi dari keresahan harian warga, seperti masalah bau lalat, air sumur yang kuning, hingga kesehatan anak-cucu. Metode ini memungkinkan warga untuk melakukan pemetaan masalah secara mandiri (self-mapping). Ketika warga merasa bahwa merekalah yang menemukan masalah dan solusinya, maka kesadaran yang muncul bersifat organik atau tumbuh dari dalam, bukan karena paksaan regulasi.

Selain itu, pendekatan melalui forum-forum warga yang sudah ada (seperti pengajian atau rapat gampong) memastikan bahwa literasi ekologis ini bersifat inklusif, menyentuh berbagai lapisan mulai dari pemuda, ibu rumah tangga, hingga kelompok pemulung. Inklusivitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa pesan lingkungan tidak dianggap sebagai ancaman bagi

kelompok tertentu. Dengan berbicara dalam bahasa yang sama dan di tempat yang sama dengan warga, WALHI berhasil membangun kepercayaan (trust building) yang menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan program advokasi dan perubahan perilaku di lingkungan TPA Gampong Jawa.

Strategi edukasi berbasis aksi yang dilakukan WALHI, seperti pendampingan warga dalam mengidentifikasi pencemaran air sumur, sebenarnya merupakan upaya untuk menciptakan fakta sosial baru. WALHI mencoba menanamkan pemahaman bahwa lingkungan yang bersih adalah hak asasi yang harus diperjuangkan secara kolektif. Hal ini selaras dengan konsep Durkheim mengenai representasi kolektif, di mana simbol-simbol lingkungan hidup mulai diintegrasikan ke dalam sistem kepercayaan masyarakat. Keberhasilan ini semakin diperkuat melalui lokalisasi isu menggunakan dakwah ekologis. Dengan membingkai pengelolaan sampah sebagai manifestasi iman melalui konsep Thaharah dan Khalifah, WALHI berhasil menyentuh inti dari kesadaran kolektif masyarakat Aceh yang religius, sehingga kewajiban menjaga alam bukan lagi dirasakan sebagai beban administratif dari pemerintah, melainkan kewajiban teologis yang mengikat secara moral.

Namun, dalam perjalanannya, WALHI menghadapi hambatan struktural yang sangat kompleks, terutama terkait benturan antara kesadaran ekologis dan ketahanan ekonomi. Dalam perspektif Durkheim, jika sebuah perubahan mengancam fungsi dasar dari salah satu organ masyarakat dalam hal ini peran

pemulung sebagai pilar ekonomi warga maka akan muncul resistensi untuk menjaga keseimbangan sosial. Inilah yang menyebabkan munculnya penolakan halus atau sikap apatis; warga khawatir bahwa kritik yang terlalu vokal terhadap TPA akan berujung pada penutupan sumber rezeki mereka. Resistensi pasif ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif baru yang ditawarkan WALHI belum sepenuhnya mampu mengalahkan kesadaran pragmatis-ekonomis yang sudah mengakar selama puluhan tahun di lokasi tersebut.

Hambatan ini semakin diperparah oleh adanya disfungsi dalam koordinasi antar elemen sosial, atau yang dalam teori Durkheim bisa menyerupai kondisi anomi kecil. Kondisi ini terjadi ketika masyarakat sudah memiliki motivasi untuk memilah sampah berkat edukasi WALHI, namun struktur pendukung dari pemerintah daerah seperti infrastruktur truk sampah dan kebijakan operasional yang konkret tidak tersedia. Ketidaksinkronan ini menciptakan kekecewaan kolektif yang melemahkan semangat perubahan perilaku. Selain itu, ketergantungan pada tokoh masyarakat dan pengaruh politik praktis menunjukkan bahwa integrasi sosial di Gampong Jawa masih sangat bergantung pada otoritas tradisional dan dinamika relasi kuasa. Tanpa adanya sinkronisasi antara nilai yang diajarkan aktivis, legitimasi dari tokoh agama, dan dukungan fasilitas dari birokrasi, kesadaran ekologis yang telah dibangun akan sulit bertransformasi menjadi perilaku kolektif yang permanen dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. WALHI Aceh menjalankan peran strategis sebagai stimulator, edukator, dan advokat melalui pendekatan partisipatif yang inklusif. Transformasi paradigma dilakukan dengan menggeser posisi masyarakat dari korban pasif (*passive victims*) menjadi subjek kritis yang memahami hak-hak ekologisnya. Strategi utama yang diterapkan meliputi penggunaan ruang kultural (seperti warung kopi), integrasi nilai-nilai teologis (dakwah ekologis), serta edukasi berbasis aksi (pelatihan pemilahan sampah dan pemetaan pencemaran). Hasilnya, terjadi peningkatan literasi lingkungan di mana warga mulai mengenali indikator pencemaran secara mandiri dan mulai mempraktikkan pemilahan sampah bernilai ekonomi, yang menandakan tumbuhnya kesadaran masyarakat Gampong Jawa.
2. Hambatan yang dihadapi WALHI dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat Gampong Jawa yaitu mencakup aspek ekonomi, budaya, struktural, dan politik. Hambatan yang paling mempengaruhi adalah

ketergantungan ekonomi warga terhadap operasional TPA yang memicu resistensi pasif karena kekhawatiran akan hilangnya mata pencaharian. Secara budaya, terdapat normalisasi terhadap pencemaran akibat kedekatan geografis yang ekstrem dengan TPA. Secara struktural, efektivitas edukasi terhambat oleh minimnya dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah serta keterbatasan sumber daya internal organisasi WALHI. Selain itu, dinamika politik lokal dan stigma terhadap gerakan advokasi sering kali membatasi ruang gerak kolaborasi operasional yang substantif antara aktivis, warga, dan pemegang kebijakan

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan bagi WALHI Aceh untuk memperkuat program pemberdayaan yang menghubungkan kesadaran ekologis dengan peningkatan pendapatan, misalnya melalui pengembangan bank sampah yang lebih profesional atau pelatihan pengolahan sampah menjadi produk bernilai jual tinggi sebagai alternatif penghasilan selain memulung.
2. Disarankan bagi masyarakat Gampong Jawa perlu menghidupkan kembali tradisi gotong royong dengan fokus pada pembersihan saluran air (drainase) yang

sering tercemar. Kesadaran untuk tidak membakar sampah plastik di area pemukiman harus menjadi kesepakatan bersama (norma sosial) demi melindungi kesehatan generasi mendatang.

3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai dampak polusi air dan udara terutama terhadap kesehatan anak-anak (balita) di sekitar TPA Gampong Jawa, guna memperkuat argumentasi advokasi kebijakan publik di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amin, Khoiruddin dan Deded Chandra. Dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terhadap Masyarakat di Sekitar TPA Air Dingin Kota Padang”. Dalam *Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, Volume 4, Nomor 4. (2024).
- Andalia, Nurlena dkk. “Pemberdayaan Masyarakat sekitar TPA Banda Aceh melalui Edukasi Pengelolaan Sampah berbasis Circular Economy”. Dalam *Jurnal Ragam Pengabdian*, Volume 2, Nomor 2. (2025).
- Arief, Teuku Muhammad Valdy. *Sampah Warga Banda Aceh Meningkat, TPA Gampong Jawa “Overload”*. Diakses dari url <https://regional.kompas.com/read/2024/01/07/135921878/sampah-warga-banda-aceh-meningkat-tpa-gampong-jawa-overload>. (2024).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rinke Cipta, 2018.
- Arif, Arifuddin M. “Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan”. Dalam *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 1, Nomor 2. (2020).
- Bakari, Olis. “Peluang dan Tantangan Mewujudkan Keadilan Ekologis dan Sosial pada Perencanaan Pembangunan dan

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai”, Dalam *Journal of Global and Multidisciplinary*, Volume 3, Nomor 2. (2025).

BPS Indonesia. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024*. Jakarta: BPS RI, 2024.

Hadi, Asraf Rahmatul. “Keterlibatan LSM WALHI dalam Advokasi Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Penanganan Sampah di TPA Gampong Jawa”. Skripsi Ilmu Politik, UIN Ar-Raniry, 2023.

Harahap, Rahma Hayati dan Devika Meysari Br Tarigan. “Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Struktural Fungsional (Kontribusi Benua Lestari Indonesia di Kota Tangerang)”. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 5, Nomor 2. (2024).

Hikmah, Nur. “Perilaku Hidup Sehat Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gampong Jawa Kota Banda Aceh”. Dalam *JAROW: Journal of Ar-Raniry on Social Work*, Volume 2, Nomor 2. (2024)

Husein, Muhammad Najib dkk. *Pengantar Penelitian Sosial*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Maulidar dan Ambia Nurdin. “Pengelolaan Sampah Plastik di TPA Kampung Jawa Banda Aceh dan Dampak Sampah Plastik

- bagi Lingkungan”. Dalam *Public Health Journal*, Volume 2, Nomor 6. (2023).
- Minarti, Ita dkk. “Adaptasi Sosio-Ekologis dan Implementasi Etika Lingkungan di Kelurahan Kahuripan Kota Tasikmalaya”. Dalam *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 3, Nomor 2. (2024).
- Moleong, Leny J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nakya, Aisha Ferin dkk. “Perbandingan Gerakan Sosial Baru Dan Gerakan Sosial Lama (Studi Kasus Di Myanmar)”. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Volume 8, Nomor 4, (2023).
- Octavianie, Sheha Adhelia dan Laila Kholid Al Firdaus. “Partisipasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta Dalam Advokasi Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021”. Dalam *Jurnal Sosilogi*, Volume 1, Nomor 1. (2025).
- Pramaiswara, Pratisto dkk. “Gerakan Sosial Baru (Studi Tentang Kontribusi Benua Lestari Indonesia Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Kota Tangerang)”. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, Volume 1, Nomor 2. (2022).
- Putra, Fadillah dkk. *Gerakan Sosial*. Malang: Aerrors Press. 2006.

- Putri, Sahvina Tesya dkk. “Advokasi Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) SUMSEL dalam Pencegahan Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir” Dalam *communnity Development Journal*, Volume 5, Nomor 5. (2024).
- Rahman, Abdul dkk. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Razak, Zulkifli. *Perkembangan Teori Sosial (Menyongsong Era PostModernisme)*. Makassar: CV. Sah Media, 2017.
- Ritzer, Geogre. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Kalsik Samapai Perkembangan Terakhir Post Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Ruslan, Murniati dkk. “Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup di Kelurahan Simpong”. Dalam *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 3, Nomor 1. (2024).
- Sembiring, Boy Jerry Even. *Ekonomi Nusantara: Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia*. Jakarta: WALHI Press, 2021.
- Situmorang, Abdul Wahib. *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sukmana, Oman. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, 2016.

Syawaludin, Mohammad. *Teori Sosial Budaya dan Methodenstreit*. Palembang: CV. Amanah, 2017.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada, 2010.

Utami, Wahyu Kartiko. “Analisis Gerakan Politik Hijau WALHI melalui Media Sosial Instagram dalam Mewujudkan Kesadaran Lingkungan”. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, Volume 2, Nomor 1. (2025).

Virgianti, Paulina dan Silfia Hanani. “Pendidikan Moral Perspektif Emile Durkheim Relevansinya Bagi Pendidikan di Indonesia”. Dalam *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 2, Nomor 4. (2023).

Wahyuni. *Teori Sosiologi Klasik*. Makassar: Rumah Buku Carabaca, 2017.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pertanyaan Wawancara

1. Sejak kapan WALHI mulai terlibat dalam isu TPA Gampong Jawa, dan apa latar belakang keterlibatan tersebut?
2. Program atau kegiatan apa saja yang dilakukan WALHI untuk meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat di sekitar TPA?
3. Bagaimana bentuk edukasi lingkungan yang dilakukan WALHI (misalnya: sosialisasi, diskusi publik, advokasi, kampanye, pendampingan)?
4. Siapa saja sasaran utama program WALHI (pemuda, ibu rumah tangga, pemulung, aparatur gampong, tokoh agama, dll.)?
5. Bagaimana metode pendekatan yang digunakan WALHI dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat?
6. Apakah WALHI bekerja sama dengan pemerintah gampong atau instansi lain dalam isu ini? Jika ya, bagaimana bentuk kerjasamanya?
7. Bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan atau kampanye yang dilakukan WALHI?
8. Apakah terdapat perubahan perilaku masyarakat setelah adanya program WALHI? Jika ya, perubahan seperti apa?

9. Bagaimana WALHI mengintegrasikan nilai-nilai agama atau pendekatan religius dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat?
10. Bagaimana peran WALHI dalam mendampingi masyarakat yang terdampak secara sosial dan kesehatan akibat TPA?
11. Menurut Anda, sejauh mana peran WALHI efektif dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat di sekitar TPA Gampong Jawa?
12. Apa saja kendala utama yang dihadapi WALHI dalam menjalankan program kesadaran ekologis di Gampong Jawa?
13. Apakah terdapat resistensi atau penolakan dari masyarakat? Jika ada, dalam bentuk apa?
14. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap isu ekologis sebelum dan sesudah intervensi WALHI?
15. Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap program WALHI di sekitar TPA?
16. Apakah keterbatasan dana atau sumber daya manusia menjadi kendala bagi WALHI?
17. Apakah terdapat hambatan budaya atau kebiasaan masyarakat yang sulit diubah terkait perilaku pengelolaan sampah?
18. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap efektivitas program kesadaran ekologis?

19. Apakah ada tekanan politik atau kepentingan tertentu yang mempengaruhi gerakan WALHI?
20. Apakah kondisi sosial seperti ketergantungan ekonomi pada TPA (misalnya pemulung) menjadi hambatan tersendiri?
21. Bagaimana peran tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam mendukung atau menghambat program WALHI?
22. Apakah media lokal berperan dalam mendukung atau justru menghambat kampanye WALHI?



Lampiran 2: Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara Bersama Perwakilan dari WALHI Aceh yaitu Kadiv Advokasi dan Kampanye



Gambar 2. Wawancara Bersama Sekretaris Desa di Gampong Jawa Kota Banda Aceh



Gambar 3. Bersama salah satu Masyarakat di sekitaran TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh



Gambar 4. Bersama salah satu Masyarakat di sekitaran TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh



Gambar 5 Bersama Pihak Pengelola Sampah di TPA
Gampong Jawa Kota Banda Aceh



Gambar 6 Bersama Pihak Pengelola Sampah di TPA
Gampong Jawa Kota Banda Aceh

Lampiran 3: SK Pembimbing Skripsi



Lampiran 4: Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Raihan
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sigli/29 Maret 2001
3. Jenis Kelamin : Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 190305078
9. Alamat : Mns Peukan, Kota Sigli
10. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Abu Bakar
 - b. Ibu : Sukarni
11. Pekerjaan : Guru/WiraSwasta
12. Alamat : Mns Peukan, Kota Sigli
13. Riwayat Pendidikan
 - a. Tahun 2008-2014 : Min Blang Asan
 - b. Tahun 2014-2017 : Al-Furqan Bambi
 - c. Tahun 2017-2019 : Man 1 Sigli

Penulis

Muhammad
Raihan